



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



PIDI 4.0
SHIFTING THEN IMPACT



BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
INDUSTRI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

2020 - 2024



KATA PENGANTAR

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa pimpinan kementerian/lembaga menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kementerian/lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Sejalan dengan pelaksanaan tersebut dan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 2020-2024 yang pada intinya mengimplementasikan Kebijakan Industri Nasional serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kementerian khususnya dalam peningkatan kualitas SDM industri dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi industri. Rencana strategis (renstra) memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPSDMI.

Renstra BPSDMI 2020-2024 merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan yang merupakan implementasi tupoksi melalui misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan pencapaian KPI yang akan diraih.

Jakarta, 23 Desember 2021

KEPALA BPSDMI



ARUS GUNAWAN



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
NOMOR 319 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI TAHUN 2020 - 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian serta untuk penyesuaian sasaran strategis, indikator, dan target indikator kinerja pada rencana strategis Kementerian Perindustrian, perlu dilakukan penyesuaian atas rencana strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa ketentuan dalam keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Tahun 2020-2024;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 478);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI TAHUN 2020 - 2024
- KESATU : Naskah Revisi Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Naskah Revisi Renstra BPSDMI Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian untuk periode 4 (empat) tahun terhitung mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.

- KEDUA : Naskah Revisi Renstra BPSDMI Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line followed by stylized, cursive letters that appear to be 'M' and 'U'.

ARUS GUNAWAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Pembangunan Industri Nasional	1
1.1.2. Pembangunan SDM Industri	3
1.2. Potensi dan Permasalahan	4
BAB 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program	7
2.1. Visi BPSDMI 2020-2024	7
2.2. Misi BPSDMI 2020-2024	8
2.3. Tujuan BPSDMI 2020-2024	8
2.4. Sasaran Program BPSDMI 2020-2024	9
2.4.1. Perspektif Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders Perspective</i>)	9
2.4.2. Perspektif Pelanggan (<i>Customer Perspective</i>)	10
2.4.3. Perspektif Proses Internal (<i>Internal Process Perspective</i>)	10
2.4.4. Perspektif Pembelajaran Organisasi (<i>Learning and Growth Perspective</i>)	10
2.4.5. Indikator Kinerja Utama	11
BAB 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	12
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPSDMI 2020-2024	12
3.1.1. Penguatan Kelembagaan Politeknik dan Akademi Komunitas Industri	16
3.1.2. Penguatan Kelembagaan SMK Industri	18
3.1.3. Penguatan Kelembagaan Balai Diklat Industri	20
3.2. Kerangka Regulasi	22
3.3. Kerangka Kelembagaan	23
BAB 4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	25
4.1. Target Kinerja	25
4.2. Kerangka Pendanaan	35
BAB 5 Penutup	38
Lampiran	39
Lampiran 1 Pohon Kinerja	39
Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Kerja	40
Lampiran 3 Matriks Keterkaitan antara Aktivitas/Kegiatan, KRO, RO, Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis	61
Lampiran 4 Pedoman Kinerja	79
Lampiran 5 Matriks Kerangka Regulasi	94

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Pembangunan Industri Nasional

Sektor industri merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga pada pembentukan daya saing nasional. Peran penting sektor industri tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (selanjutnya disebut UU No. 3/2014 Perindustrian) di mana industri diletakkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain untuk mencapai visi Indonesia Maju 2030.



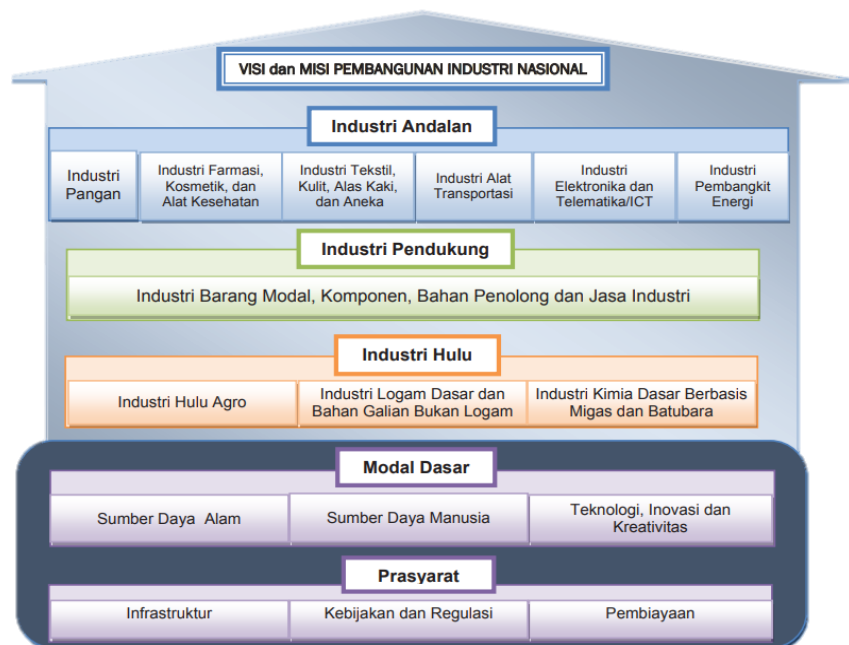
Gambar 1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU No. 3/2014 Perindustrian
Sumber: UU No. 3/2014 Perindustrian

Arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2015. Sebagai peta jalan pembangunann industri jangka panjang, RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bersama bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.



Gambar 2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam RIPIN
Sumber: PP No. 14/2015 RIPIN 2015-2035

RIPIN Tahun 2015-2035 membagi capaian pembangunan industri ke dalam tiga tahap (lihat Gambar 2), yaitu Tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas; diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten, serta peningkatan penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sedangkan Tahap III (2025-2035) adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi (lihat Gambar 3). Saat ini, implementasi RIPIN telah memasuki Tahap II, yang dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN) periode 2020-2024.



Gambar 3. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional
Sumber: PP No. 14/2015

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri nonmigas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sekitar 17,1 juta

tenaga kerja sektor industri dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja industri sebesar 600 ribu pekerja setiap tahunnya.

Di sisi yang lain, seiring dengan perkembangan perindustrian global, pengembangan dan adopsi teknologi industri 4.0 muncul sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan industri nasional. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 di mana penerapan Industri 4.0 merupakan salah satu *major project* Pemerintah. Penerapan Industri 4.0 dinilai dapat memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas, yang diharapkan akan menarik investasi di bidang industri, karena industri di Indonesia akan lebih produktif dan berdaya saing tinggi dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam mengadopsi teknologi.

1.1.2. Pembangunan SDM Industri

Menurut survei angkatan kerja nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2017, terdapat 128 juta angkatan kerja dari 192 juta penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 121 juta bekerja, tetapi lebih dari 60% tenaga kerja berpendidikan maksimum Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 87,9% berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau lebih rendah. Jumlah pengangguran terbuka mencapai 7 juta jiwa dengan 37,6% berpendidikan maksimum SMP dan 87,8% berpendidikan SMA/SMK atau lebih rendah.

Melihat realitas yang terjadi dalam upaya pembangunan SDM sampai hari ini, Indonesia belum siap untuk menyongsong Visi Indonesia 2030, terutama untuk menghadapi Pasar Bebas ASEAN dan bonus demografi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu menyerap dan menciptakan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan penurunan elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Asumsi 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 350 ribu sampai 400 ribu tenaga kerja tidak dapat tercapai. Asumsi tersebut hanya mampu menyerap 200 ribu tenaga kerja tiap tahunnya. HDI (*Human Development Index*) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia saat ini hanya 0,629 atau peringkat 121 dari 186 negara di dunia.

Tabel 1. Struktur Demografi Penduduk Indonesia

Usia*	Jumlah (%)	Pria (orang)	Wanita (orang)
0 – 14 tahun	25,82	33.651.533	32.442.996
15 – 24 tahun	17,07	22.3238.735	21.454.563
25 – 54 tahun	42,31	55.196.144	53.124.591
55 – 64 tahun	8,18	9.608.548	11.328.421
≥ 65 tahun	6,62	7.368.764	9.579.379

*usia produktif ditandai dengan huruf tebal dan warna latar berbeda

Sumber: BPS 2017, diolah oleh Kemenperin

Hambatan pengembangan SDM di Indonesia dilandasi oleh tiga hal pokok yang tidak dapat dihindari, yaitu: *pertama*, liberalisasi dan eksklusivitas pendidikan yang menyebabkan sekolah mahal dan angka putus sekolah tinggi. *Kedua*, sistem pendidikan yang tidak *link and match*, artinya pendidikan hari ini lebih menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas, bukan pada keterampilan. *Ketiga*, pembangunan SDM tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, hal ini dapat dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2025 yang tidak menjadikan pembangunan SDM sebagai skala prioritas.

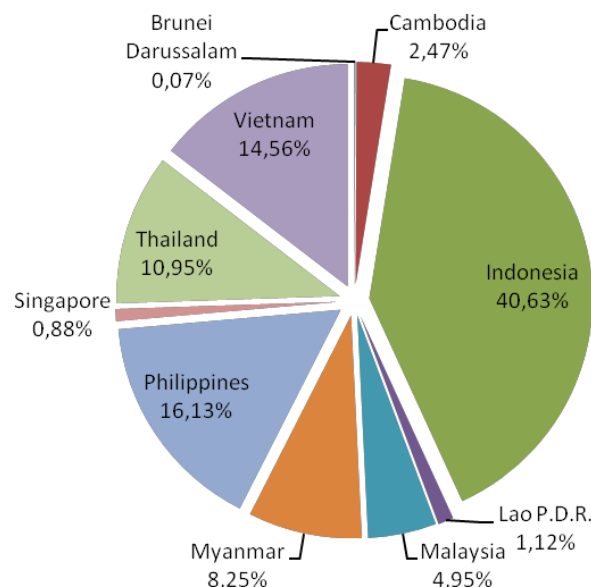
Kegagalan SDM hari ini merupakan bagian dari kegagalan perekonomian Indonesia yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Selain itu, belum adanya peta jalan pengembangan SDM dan visi misi yang jelas dalam RPJPN 2004-2025, serta pemerintah belum mampu meningkatkan masyarakat kelas bawah menuju kelas menengah secara signifikan. Kegagalan ini dapat dilihat dengan realitas dari

250 juta lebih penduduk Indonesia, sekitar 35 juta penduduk merupakan masyarakat miskin. Di sisi lain, hanya 3,78% penduduk yang berpendidikan S3, sementara penduduk yang berpendidikan SD mencapai 33% penduduk.

Oleh karena itu, untuk mengawali pembangunan SDM Indonesia diperlukan suatu solusi yang baru. Reformasi di bidang pendidikan semakin penting, terutama dengan mendorong pendidikan murah, reformasi sistem pendidikan yang *link and match* dan job, serta pengajaran budi pekerti. Tidak hanya itu, dibutuhkan pula pengelolaan iklim tenaga kerja, revitalisasi pendidikan dan latihan SDM, pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik, pengembangan regulasi tenaga kerja, dan perbaikan hubungan industrial, serta menjadikan pembangunan SDM sebagai prioritas program pembangunan nasional. Solusi-solusi tersebut diharapkan mampu mengantarkan Indonesia menuju Visi Indonesia 2030 dengan SDM yang siap dan berdaya saing.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Salah satu keunggulan Indonesia adalah bonus demografi yang besar. Berdasarkan proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2015), bonus demografi Indonesia akan mencapai puncak pada tahun 2025. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar di ASEAN (*the Association of Southeast Asian Nations*) yang mencakup lebih dari 40% penduduk ASEAN. Selain itu Indonesia juga merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia atau sebesar 3,44% populasi dunia. Salah satu kekuatan penting dalam komposisi demografi Indonesia adalah jumlah usia muda yang besar sebagai angkatan kerja, yaitu sebanyak 172.951.002 jiwa atau sebesar 67.5% dari total penduduk Indonesia. Apabila dikelola dengan baik, penduduk usia produktif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing. Sebaliknya, bila tidak dikelola dengan baik, bonus demografi berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran.



Gambar 4. Populasi Indonesia di ASEAN
Sumber: Sumber: BPS 2017, diolah Kemenperin

Merujuk pada RIPIN 2015-2035, tenaga kerja industri akan bertambah rata-rata 600 ribu pekerja per tahun. Oleh karena itu, target pembangunan SDM industri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri adalah rata-rata 3,2 persen per tahun dengan komposisi tenaga kerja manajerial sebesar 12% (dua belas persen) dan tenaga kerja teknis sebesar 88% (delapan puluh delapan persen). Demi tercapainya target tersebut, BPSDMI bertugas untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja industri. Namun demikian, keadaan di lapangan masih menunjukkan bahwa lembaga diklat dan

lembaga sertifikasi yang ada saat ini belum mampu memenuhi kapasitas pelatihan dan sertifikasi sebanyak itu per tahunnya.

Di sisi yang lain, globalisasi menambah kompleksitas perkembangan pengembangan tenaga kerja industri. Menurut ASEAN *Framework on Service Agreement* (AFAS), perdagangan jasa di ASEAN dapat dilakukan dengan empat cara, atau dikenal dengan *four modes*. Cara ke-4 atau Mode 4 mengacu kepada “*movement of natural persons*”, yaitu kehadiran tenaga kerja profesional asing di suatu negara untuk memberikan layanan jasanya. Dengan kata lain, Mode 4 merupakan suatu cara perdagangan jasa dengan cara menghadirkan tenaga kerja asing di Indonesia. Pemerintah sudah berupaya keras membatasi hal tersebut, namun globalisasi merupakan sebuah gelombang besar yang tidak dapat terbendung lagi.

Saat ini, dampak globalisasi Mode 4 yang paling relevan dengan Indonesia adalah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam waktu dekat. Semangat yang dibawa oleh MEA adalah “*transform ASEAN into a region with free movement of goods, services, investment, skilled labour, and free flow of capital*”. Dengan semangat tersebut, perpindahan tenaga kerja antarnegara anggota ASEAN akan menjadi semakin cepat. Hal ini akan mengakibatkan persaingan yang semakin ketat antar para pencari kerja. Pemerintah Indonesia, khususnya Kemenperin, harus mempersiapkan suatu mekanisme peningkatan kompetensi SDM industri untuk menghadapi persaingan tersebut.

Permasalahan dalam pengembangan SDM industri tidak hanya soal jumlah dan kualitas, namun juga soal pengakuan kualifikasi. Salah satu isi kerja sama dalam MEA adalah mengenai “*recognition of professional qualification*” atau pengakuan kualifikasi dari tenaga kerja profesional. Pengakuan ini diakomodasi melalui *Mutual Recognition Agreement (MRA) for professional services*. MRA dari profesi tertentu mengatur bagaimana kualifikasi profesi tersebut diakui oleh ASEAN. MRA akan membuat satu lembaga yang mengakui kualifikasi profesional dari negara-negara ASEAN berupa sertifikat kompetensi, dan sertifikat kompetensi inilah yang akan diakui oleh semua negara ASEAN. Artinya, perpindahan tenaga kerja lintas negara nanti tidak hanya menggunakan ijazah, tetapi juga sertifikat tersebut. Untuk mengakomodasi MRA tersebut, kita memerlukan suatu Standar Kompetensi Kerja yang dapat disandingkan dengan *National Qualification Framework (NQF)* milik negara lain, sehingga semua negara ASEAN memiliki pengertian yang sama mengenai kualifikasi profesional. Standar Kompetensi Kerja tersebut akan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi dalam membuat program pendidikan, program pelatihan, dan materi uji kompetensi.

Sejak masa awal pandemi hingga saat ini, upaya peningkatan produktivitas di sektor industri dalam telah dilakukan dengan pendekatan yang memprioritaskan penerapan protokol kesehatan. Hal tersebut diharapkan dapat memacu peningkatan utilitas dan memulihkan produktivitas, serta membuka kesempatan kerja dan mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang didukung dengan transformasi ekonomi dan perubahan sosial, salah satunya dengan dukungan teknologi digital yang meningkatkan efisiensi kerja. Ke depannya, prioritasasi pada upaya penanganan dampak COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan melanjutkan *trend* perkembangan yang positif ini.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah juga telah mengambil beberapa inisiasi kebijakan strategis untuk mendukung pembangunan bidang perindustrian di Indonesia. Inisiatif pertama adalah upaya implementasi peta jalan *Making Indonesia 4.0* pada tujuh sektor industri prioritas, yaitu industri makanan dan minuman, kimia, tekstil dan busana, otomotif, elektronika, farmasi serta alat kesehatan. Selain itu, pemerintah juga mencanangkan program substitusi impor hingga 35% pada 2022 melalui penurunan impor pada sektor-sektor dengan persentase impor terbesar, simultan dengan upaya peningkatan utilisasi produksi. Target substitusi impor dapat dicapai melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui pemberlakuan kewajiban bagi Kementerian, Lembaga, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) mencapai 40% seperti diatur dalam

PP No. 29/2018 Pasal 61. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan TKDN yang sebelumnya cenderung bersifat *inward looking*, diarahkan agar berspektrum luas/*outward looking* dengan perspektif P3DN sebagai fasilitator.

Terkait pendidikan vokasi, di Indonesia pendidikan vokasi sudah ada sejak lebih dari 150 tahun yang lalu dan berkembang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun perannya dalam pembangunan kualitas tenaga kerja relatif kecil dibandingkan dengan pendidikan umum (akademik). Pasokan tenaga kerja terdidik sebagian besar merupakan lulusan pendidikan akademik atau pendidikan umum. Di antara tenaga kerja berpendidikan sekolah menengah atas, hanya 35% yang merupakan lulusan SMK. Di antara tenaga kerja berpendidikan tinggi, hanya 25% lulusan program diploma dan politeknik. Komposisi pasokan tenaga kerja tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih berminat mengikuti pendidikan akademik daripada pendidikan vokasi. Untuk itu, pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, baik politeknik/akademi komunitas maupun SMK, perlu meningkatkan kualitasnya sehingga dapat bersaing dengan pendidikan akademik.

Menghadapi potensi dan permasalahan seperti disebutkan di atas, Kementerian Perindustrian melalui BPSDMI perlu secara strategis menajamkan perencanaan pembangunan SDM industri dalam Renstra BPSDMI Tahun 2020-2024 untuk memastikan bahwa agenda pembangunan SDM Industri di Indonesia dapat berjalan dengan efektif. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan-kebijakan strategis di lingkungan BPSDMI akan berdampak pada tercapainya pemanfaatan potensi dan peluang yang ada sekaligus mengantisipasi setiap kendala dan hambatan yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bidang perindustrian di Indonesia. Di sisi yang lain, implementasi kebijakan strategis yang tidak berjalan secara efektif akan berdampak pada terjadinya stagnasi dan bahkan kemunduran performa bidang perindustrian di Indonesia.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah dari UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPSDMI telah menyusun Rencana Strategis BPSDMI Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. BPSDMI sebagai unit Eselon I di bawah Kemenperin mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMI dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. Renstra BPSDMI Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan disusun dengan pedoman Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 6/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri (Pasal 218). Dinamika perkembangan industri yang terus berubah menuntut BPSDMI untuk belajar dan beradaptasi secara lebih cepat, dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya, proses bisnis dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan organisasi. Perkembangan teknologi menyebabkan materi belajar harus mudah diakses kapan saja dan dimana saja, proses bisnis pembangunan SDM harus aplikatif, relevan/adaptif, mudah diakses, dan memberikan dampak yang signifikan. Kerangka pembelajaran harus mampu mencetak agen perubahan, dan *knowledge* di organisasi yang banyak, beragam dan tersebar serta melekat pada orang, harus dapat diintegrasikan dan memberikan manfaat bagi organisasi.

2.1. Visi BPSDMI 2020-2024

Salah satu prioritas pemerintah dalam pembangunan sektor industri yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yang dipimpin oleh seorang menteri, bertugas membantu presiden di bidang perindustrian. Visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu "*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Dari sudut pandang sektor industri, visi tersebut dapat diterjemahkan menjadi upaya mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru, serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri, sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pengelolaan sumber daya yang ada dilakukan melalui implementasi Making Indonesia 4.0 dengan kekuatan SDM yang kompeten dan pemanfaatan dan pengelolaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) inovatif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Visi dan misi BPSDMI disusun dengan menyelaraskan visi dan misi Kemenperin dengan tugas dan fungsi BPSDMI, serta kondisi SDM industri yang ingin dicapai pada akhir 2024, seperti yang termaktub di dalam buku *Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju "Corporate University" BPSDMI Kementerian Perindustrian*. Selain itu, penyusunan visi dan misi BPSDMI juga mempertimbangkan capaian kinerja, kondisi internal dan eksternal (potensi dan permasalahan), arah organisasi ke depan, serta aspirasi dari *stakeholders* terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka visi BPSDMI ditetapkan sebagai berikut:

"Menjadi vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh."

Vokasi industri bertaraf global tersebut pada rumusan visi di atas dapat dimaknai sebagai upaya BPSDMI membangun vokasi industri yang mampu bersaing dengan vokasi industri di negara-negara lain di kancah dunia. Sejalan dengan visi tersebut, BPSDMI juga senantiasa menjunjung nilai-nilai yang telah ditetapkan bagi pegawai Kemenperin untuk menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan semangat bergotong royong yang diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan industri

di Indonesia. Nilai-nilai tersebut terdiri dari **integritas, profesional, inovatif, produktif, dan kompetitif**. Lima nilai ini disebut **INSAN OKE** yang harus diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh semua aparatur Kemenperin ketika bekerja, bersikap, dan berkontribusi dalam pengembangan industri nasional.

2.2. Misi BPSDMI 2020-2024

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan BPSDMI sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan vokasi industri *dual system* bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional;
2. Mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
3. Membangun Balai Diklat Industri sebagai *Center of Excellences* pembangunan tenaga kerja industri;
4. Membangun Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai *hub* dan *ecosystem center* industri 4.0;
5. Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri;
6. Membangun *Digital ASN Talent Pool and Knowledge Management Center* sebagai Pusat Pembinaan ASN Pembina Industri;
7. Membangun pusat pengembangan (*development center*) infrastruktur kompetensi industri;
8. Membangun wadah (*hub center*) sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan seluruh *stakeholder* nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

2.3. Tujuan BPSDMI 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan SDM industri seperti disebutkan di atas, BPSDMI menetapkan tujuan pembangunan SDM industri 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

“Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh.”

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui implementasi dan pengukuran indikator kinerja sasaran strategis yang akan disampaikan secara lebih detail dalam Bab 4. Dalam 5 tahun kedepan BPSDMI Kementerian Perindustrian akan menghasilkan SDM Industri sebanyak 370.000 dengan rincian sebagai berikut:

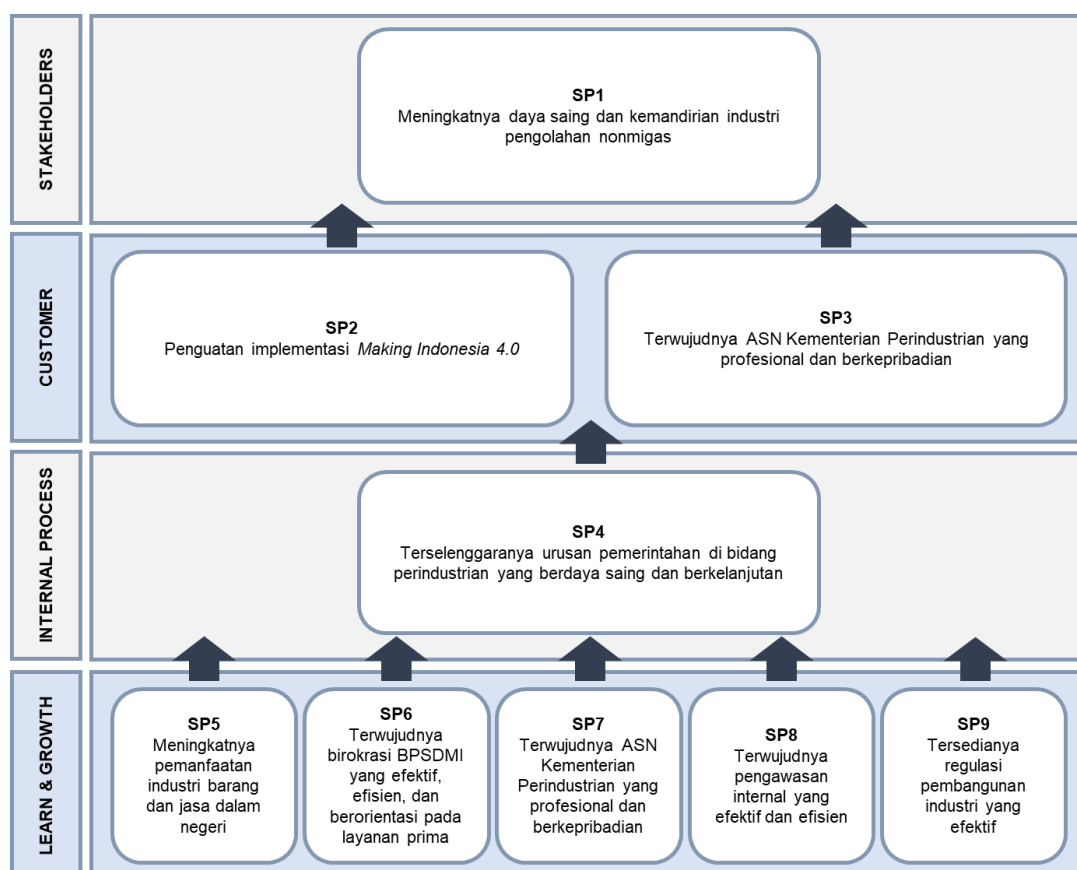
Indikator Tujuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya SDM industri yang kompeten	29000	54000	36000	123000	128000

Indikator ini terdiri atas:

- a) Tenaga kerja industri diantaranya terdiri dari lulusan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, Lulusan SMK dan Politeknik/Akademi komunitas Kementerian Perindustrian pada tahun berjalan, diklat SDM 4.0, dan Tenaga Kerja Industri yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi
- b) Pembina industri merupakan ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi, misal diklat teknis industri, diklat fungsional, diklat penjenjangan, rintisan gelas, diklat instruktur
- c) Wirausaha industri merupakan jumlah orang yang mengikuti inkubator bisnis yang difasilitasi oleh Balai Diklat Industri

2.4. Sasaran Program BPSDMI 2020-2024

Sasaran program pembangunan SDM Industri BPSDMI merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BPSDMI sebagai suatu *impact/outcome* dari rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDMI. Dalam penyusunannya, BPSDMI menjabarkan masing-masing sasaran program dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran program tersebut diukur melalui indikator kinerja program. Peta strategi BPSDMI dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 5. Peta Strategi BPSDMI Tahun 2020-2024

2.4.1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Prespective*)

Sasaran program pertama (SP1) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas”, dengan indikator kinerja:

1. Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas meningkat dari 17,44 juta orang pada 2020 menjadi 21,94 juta orang pada 2024.
2. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja naik dari 13,58 persen pada 2020 menjadi 15,65% pada 2024.
3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas meningkat dari 111,66 juta per orang per tahun pada 2020 menjadi 124,74 juta per orang per tahun pada 2024.
4. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi meningkat dari 17.000 orang pada 2020 menjadi 100.000 orang pada 2024.
5. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan meningkat dari 50 persen pada 2020 menjadi 83 persen pada 2024.

2.4.2. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

Sasaran program kedua (SP2) yang akan dicapai adalah “Penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0*”, dengan indikator kinerja:

1. Jumlah SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya sebesar 400 orang per tahun sejak 2020 sampai dengan 2024.
2. Jumlah implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi meningkat dari satu implementasi pada 2020 menjadi sembilan implementasi pada 2024.
3. Persentase utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 meningkat dari 30 persen pada 2020 menjadi 95 persen pada 2024.

Sasaran program ketiga (SP3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian”, dengan indikator kinerja:

1. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik meningkat dari 80 persen pada 2020 menjadi 90 persen pada 2024.
2. Efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional meningkat dari 0 persen pada 2020 menjadi 85 persen pada 2024.

2.4.3. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran program pada perspektif proses internal merupakan sasaran yang dicapai melalui proses yang dilakukan oleh BPSDMI. Sasaran program yang akan dicapai, yakni sasaran program keempat (SP4), yaitu “Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang industri meningkat dari 8 (delapan) pada 2020 menjadi 10 (sepuluh) pada 2024.
2. Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri yang difasilitasi meningkat dari 5 (lima) LSP dan TUK pada 2020 menjadi 20 (dua puluh) LSP dan TUK pada 2024.
3. Jumlah asesor kompetensi dan lisensi meningkat dari 144 asesor pada 2020 menjadi 320 asesor pada 2024.
4. Jumlah perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat meningkat dari 4 perusahaan pada 2020 menjadi 12 perusahaan pada 2024.
5. Nilai minimum akreditasi program studi di politeknik meningkat dari nilai 301 akreditasi B pada 2020 menjadi 361 akreditasi A pada 2024.
6. Jumlah penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional meningkat dari 100 penelitian pada 2020 menjadi 200 penelitian pada 2024.
7. Jumlah inkubator bisnis industri yang tumbuh meningkat dari 41 *tenant* pada 2020 menjadi 70 *tenant* pada 2024.

2.4.4. Perspeelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output*, *outcome*, maupun *impact* dari kinerja BPSDMI. Terdapat 5 (lima) sasaran program yang akan dicapai, yakni:

Sasaran program kelima (SP5), yaitu “Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri”, dengan indikator kinerja:

1. Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI meningkat menjadi 80 persen pada 2024.

Sasaran program keenam (SP6), yaitu “Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”, dengan indikator kinerja:

1. Nilai laporan keuangan BPSDMI meningkat dari 70 pada 2020 menjadi 78 pada 2024.
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) BPSDMI meningkat dari 70 pada 2020 menjadi 78 pada 2024.
3. Nilai kearsian BPSDMI meningkat dari 0 pada 2020 menjadi 80 pada 2024.

Sasaran program ketujuh (SP7), yaitu “Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian”, dengan indikator kinerja:

1. Nilai rata-rata Indeks Kompetensi profesional ASN BPSDMI meningkat dari 70 pada 2020 menjadi 80 pada 2024.

Sasaran program kedelapan (SP8), yaitu “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, dengan indikator kinerja:

1. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti meningkat dari 91 persen pada 2020 menjadi 93 persen pada 2024.
2. Level Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) meningkat dari level 3 pada 2020 menjadi level 4 pada 2024.

Sasaran program kesembilan (SP9), yaitu “Tersedianya regulasi terkait SDM industri yang efektif”, dengan indikator kinerja:

1. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI meningkat menjadi 78 persen pada 2024.

2.4.5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) merupakan indikator kinerja pada Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian yang pelaksanaannya diampu oleh BPSDMI yaitu:

1. Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas
2. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja
3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas
4. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi
5. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan
6. Jumlah SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya
7. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik
8. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang industri
9. Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPSDMI 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi BPSDMI 2020-2024, yaitu menjadi vokasi industri bertaraf global yang mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh, BPSDMI menetapkan arah kebijakan BPSDMI 2020-2024, yaitu **memperkuat kelembagaan vokasi industri**. Arah kebijakan ini kemudian juga dipertajam melalui tiga kebijakan penguatan kelembagaan yang lebih detail, yaitu:

1. Penguatan kelembagaan politeknik dan akademi komunitas industri
2. Penguatan kelembagaan SMK industri
3. Penguatan kelembagaan Balai Diklat Industri

Untuk menguatkan kelembagaan vokasi industri, BPSDMI memiliki delapan arah kebijakan, yaitu:

1. Mengembangkan pendidikan vokasi industri *dual system* bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional.

Dalam upaya mendukung industrialisasi di Indonesia, pendidikan vokasi diharapkan dapat menerapkan pendidikan sistem ganda (*dual system education*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri. Pada implementasinya, penyelenggaraan pendidikan vokasi perlu berkolaborasi dengan industri dengan menitikberatkan proses pembelajaran di dua tempat, yaitu di sekolah/kampus dan di industri. Penyelenggaraan pendidikan sistem ganda dapat mendorong pelaku dunia usaha dan dunia industri untuk turut mengambil tanggung jawab yang lebih besar, serta mengisi lapangan kerja industri dengan profil lulusan yang terampil dan berpengetahuan tinggi (*high skilled & know how*).

2. Mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri.

Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja industri saat ini dihadapkan pada tantangan besar dan aneka ragam kebutuhan pelatihan kerja di berbagai sektor industri. Hal ini terutama terkait dengan kebutuhan untuk merespons terjadinya disrupsi di berbagai bidang pekerjaan. Pada saat yang sama, upaya yang dilakukan juga harus merespon ledakan penduduk usia produktif (bonus demografi) yang perlu disiapkan kompetensinya agar dapat siap kerja. Belakangan bahkan ditambah dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan setengah pengangguran. Kondisi ini menuntut perlunya dikembangkan jenis dan sistem pelatihan yang dapat mengakomodasi kebutuhan industri, salah satunya dengan mengembangkan jenis pelatihan *triple skilling* mencakup:

- a. Pelatihan *skilling* yang bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada calon tenaga kerja industri.
- b. Pelatihan *up-skilling* ditujukan bagi para tenaga kerja industri untuk meningkatkan keahlian teknis mereka ke level yang lebih tinggi dari keahlian yang sudah dimiliki.

- c. Pelatihan *re-skilling* bertujuan untuk menambah keahlian baru bagi para angkatan kerja untuk bidang keahlian lain sesuai dengan kebutuhan industri.

Untuk dapat menyelenggarakan pelatihan yang profesional, perlu dikembangkan sistem yang mencakup: perencanaan pelatihan yang terstruktur dan sistematis, penyediaan SDM penyelenggara dan instruktur yang kompeten, penyiapan fasilitas sarana dan prasarana yang modern dan memadai, pemanfaatan sistem informasi pelatihan yang terintegrasi, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi pelatihan.

3. Membangun Balai Diklat Industri sebagai *center of excellences* pembangunan tenaga kerja industri.

Pengembangan SDM industri, utamanya tenaga kerja industri, pada era yang dinamis dan fleksibel ini memaksa adanya penguasaan keterampilan dan keahlian sesuai kebutuhan industri. Oleh sebab itu, pelatihan vokasi industri di Balai Diklat Industri (BDI) menyelenggarakan pelatihan jenis *triple skilling* yang mencakup pelatihan *skilling*, *up-skilling*, dan *re-skilling*. Sistem penyelenggaraan pelatihan vokasi industri ditetapkan menggunakan sistem *3-in-1*, meliputi: pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja bagi lulusan pelatihan. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan kurikulum dan modul yang mengacu pada kompetensi yang dibutuhkan industri agar terbentuk *link-and-match* antara lembaga pelatihan dengan perusahaan industri agar menghasilkan lulusan pelatihan yang kompeten dan siap kerja.

Selain tenaga kerja industri, BDI juga diarahkan untuk menyiapkan wirausaha industri melalui inkubator bisnis dan menjalin kemitraan pengelolaan inkubator bisnis dengan pihak lain seperti: politeknik, asosiasi industri, komunitas industri, serta kementerian/lembaga terkait. BDI juga diarahkan untuk menyelenggarakan pelatihan/diklat bagi pembina industri, khususnya pelatihan jabatan fungsional yang jumlahnya meningkat seiring peralihan jabatan struktural menjadi fungsional pada akhir tahun 2020. Untuk menjalankan perannya, BDI harus dapat menjadi *center of excellences* dalam pembangunan SDM industri khususnya melalui jalur pelatihan vokasi industri. Pengelolaan manajemen dan fasilitas pelatihan pada BDI harus diarahkan agar mampu mendukung pencapaian visi dan tujuan BDI.

4. Membangun Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai *hub* dan *ecosystem center* industri 4.0.

Pembangunan Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) merupakan bagian dari implementasi peta jalan *Making Indonesia 4.0*. PIDI 4.0 menerapkan lima pilar dalam mendukung transformasi industri 4.0, yaitu:

- *Showcase center* yang berfungsi untuk meningkatkan *awareness* industri terhadap pentingnya penerapan industri 4.0.
- *Capability center* untuk membangun keahlian teknologi industri 4.0.
- *Ecosystem center* yang menghubungkan para *stakeholder* industri.
- *Delivery center* untuk transformasi perusahaan industri dalam penerapan teknologi 4.0.
- *Innovation center* dalam berbagai proyek uji coba dan *brokerage* di sektor industri.

Untuk memperluas jangkauan dan manfaat PIDI 4.0, serta penguatan peran unit pendidikan Kemenperin dalam penyediaan tenaga kerja industri yang adaptif terhadap revolusi industri 4.0, pembangunan satelit PIDI 4.0 dengan teknologi kunci yang berbeda dan spesifik di beberapa politeknik. Satelit PIDI 4.0 akan menjalankan setidaknya dua pilar layanan PIDI 4.0,

yaitu sebagai *showcase center* dan *capability center* sesuai dengan spesialisasi industri di masing-masing politeknik.

5. Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri.

Saat ini tingkat kewirausahaan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, yaitu berada di angka 3,47%, di bawah Singapura (hampir 9%) atau Malaysia dan Thailand (hampir 5%). Untuk menjadi negara maju, dibutuhkan setidaknya 4% jumlah wirausaha. Oleh karena itu, pembentukan dan pengembangan wirausaha industri memerlukan intervensi dan dukungan dari pemerintah, tidak hanya dalam bentuk fasilitasi peralatan dan pendanaan, tetapi juga pembentukan SDM wirausaha yang berdaya saing.

Peran pembentukan SDM wirausaha industri dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi industri di politeknik/akademi komunitas Kemenperin. Keduanya telah dilengkapi dengan laboratorium dan *teaching factory* yang dapat digunakan sebagai sarana inkubasi. Sehingga, selain meluluskan tenaga kerja kompeten, politeknik dan akademi komunitas juga perlu membentuk wirausaha. Pengembangan peran sebagai inkubator bisnis tersebut tentunya perlu dilakukan dengan membangun kolaborasi dengan para *stakeholder* terkait, antara lain: Ditjen IKMA Kemenperin, BDI, lembaga pembiayaan, serta asosiasi industri.

6. Membangun *Digital ASN* dan *Knowledge Management Center* sebagai pusat pembinaan ASN pembina industri.

UU No. 3/2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa pembangunan SDM industri meliputi pembangunan pembina industri, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi di bidang industri. ASN bidang industri merupakan pemeran utama dalam pembangunan industri yang berdaya saing global di era revolusi industri 4.0. Untuk itu, pembangunan ASN pembina industri sebagai *Digital ASN* perlu disiapkan dan diprioritaskan untuk mendukung transformasi birokrasi digital di era revolusi industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pembangunan *Digital ASN* yang inovatif, adaptif, dan progresif, membutuhkan program pengembangan dengan pendekatan yang lebih strategis serta mengintegrasikan optimalisasi sistem informasi dan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat diakomodasi dengan mewujudkan *Corporate University* Kemenperin. Strategi untuk mendukung terwujudnya *Corporate University* BPSDMI Kemenperin antara lain:

1. Mengembangkan kompetensi pejabat administratif dan fungsional melalui:
 - 1) Pengembangan kompetensi pejabat administratif melalui program pelatihan dan pendidikan.
 - 2) Pengembangan kompetensi pejabat fungsional melalui *job formation mapping*, *talent mapping*, sistem elektronik Daftar Usulan Perhitungan Angka Kredit (DUPAK), dan pola pengembangan jabatan fungsional.
2. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan ASN yang berbasis kompetensi melalui:
 - 1) Pengembangan program pendidikan dalam dan luar negeri.
 - 2) Pengembangan pelatihan ASN industri berbasis kompetensi
 - 3) Pengembangan infrastruktur pendidikan dan pelatihan SDM aparatur bidang industri.
3. Menyelenggarakan *smart training* dan sertifikasi kompetensi bagi ASN melalui:
 - 1) *e-Self learning*

- 2) *Classical learning*
- 3) *Blended learning*
4. Mengembangkan sinergi pembinaan jabatan fungsional melalui kerja sama antar satuan kerja dan unit pembina teknis jabatan fungsional di lingkungan Kemenperin.
5. Mengembangkan *Knowledge Management Center* ASN pembina industri.

7. Membangun pusat pengembangan (*development center*) infrastruktur kompetensi industri.

UU No. 3/2014 mengamanatkan pembangunan SDM industri dilakukan untuk menghasilkan SDM yang kompeten. Amanat tersebut dapat diartikan bahwa untuk mengukur capaian kinerja pembangunan SDM industri perlu dikembangkan infrastruktur kompetensi. Infrastruktur kompetensi meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan tenaga asesor kompetensi. Kompetensi-kompetensi yang sudah distandarkan dalam SKKNI pun perlu dikualifikasikan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) agar memudahkan penerapan baik dalam hal pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

Upaya pembangunan infrastruktur kompetensi tidak dapat dilakukan hanya oleh BPSDMI, tetapi juga kolaborasi dari seluruh pihak, terutama: industri, asosiasi industri, K/L terkait, serta setiap direktorat pembina industri di Kemenperin. Guna mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dan pengembangan standar kompetensi dan kualifikasi kompetensi sektor industri, telah dibentuk Komite Standar Kompetensi melalui Kepmenperin No. 1456/2019. Melalui keberadaan komite tersebut, masing-masing direktorat pembina industri di Kemenperin memiliki peran yang sama dalam membangun infrastruktur kompetensi, khususnya SKKNI dan KKNI, di lingkup industri binaannya di bawa koordinasi ketua komite (Kepala BPSDMI) dan sekretariat komite (Pusdiklat SDM Industri). Komite Standar Kompetensi akan dikembangkan menjadi pusat pengembangan infrastruktur kompetensi di BPSDMI.

8. Membangun wadah (*hub center*) sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan seluruh *stakeholder* nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

Arah kebijakan ini dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sinergi kolaborasi dan kerja sama dengan *stakeholder*.
Kemenperin melalui BPSDMI memimpin inisiatif pengembangan *link and match* antara dunia industri dengan dunia pendidikan dengan mengkoordinasikan dan menjadi inspirasi untuk mendorong peran aktif sektor terkait.
- 2) Penguatan kerja sama luar negeri bidang vokasi industri.
Kerja sama dengan mitra luar negeri bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik institusi dan SDM yang kompetitif dalam membangun kebersamaan regional dan internasional untuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Adapun kebijakan penguatan tiga kelembagaan dijelaskan pada bagian berikut:

3.1.1. Penguatan Kelembagaan Politeknik dan Akademi Komunitas Industri

Untuk memperkuat kelembagaan politeknik dan akademi komunitas industri, BPSDMI memiliki tujuh arah kebijakan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan *dual system* dengan *STEM learning model* berstandar global.

Strategi implementasi arah kebijakan ini akan menyorot tiga aspek, yaitu:

- 1) Pendidikan sistem ganda (*dual system education*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri. Untuk mewujudkan pendidikan sistem ganda, tahapan yang wajib dilakukan antara lain:
 - a. peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
 - b. penerapan kurikulum *link and match* dengan industri;
 - c. revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d. penerapan *teaching factory/teaching industry*;
 - e. peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi;
 - f. penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi;
 - g. pengembangan laboratorium *teaching factory* dan lokakarya (*workshop*) terintegrasi;
 - h. pengembangan *smart* dan *cyber campus*; dan
 - i. pengembangan program studi baru.
- 2) Model pembelajaran STEM (*science, technology, engineering, and mathematics*) yang mengintegrasikan empat bidang dalam sekali pengalaman belajar. Model ini diterapkan dalam perkuliahan/pembelajaran agar dapat mendorong mahasiswa untuk mendesain, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi; mengasah kognitif, manipulatif dan afektif; serta mengaplikasikan pengetahuan. Pembelajaran berbasis STEM dapat melatih mahasiswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk membuat desain sebagai bentuk pemecahan masalah terkait lingkungan dengan memanfaatkan teknologi.
- 3) Pengembangan pendidikan berstandar global dengan mendorong politeknik/akademi komunitas untuk mendapatkan akreditasi internasional dari ASIIN (*the Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics*) melalui empat tahapan, yaitu:
 - a. evaluasi dan sertifikasi institusional;
 - b. *workshop* dan pelatihan; dan
 - c. sertifikasi; serta
 - d. pasca-akreditasi/sertifikasi (pemeliharaan).

2. Melaksanakan penelitian terapan *problem solving* di *leading sector* industri prioritas.

Arah kebijakan ini diimplementasikan melalui enam strategi, yaitu:

- 1) Penelitian terapan *problem solving* pada tujuh sektor industri prioritas, yaitu: 1) industri pangan; 2) industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; 3) industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; 4) industri alat transportasi; 5) industri elektronika dan telematika; 6) industri pembangkit energi; 7) industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri.
- 2) Implementasi hasil penelitian di industri dengan tujuan meningkatkan daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas, serta meningkatkan kemampuan industri dalam negeri. Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan inovasi teknologi;
 - b. peningkatan mutu dan diversifikasi produk/proses;

- c. implementasi hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa industri untuk IKM; dan
 - d. komersialisasi hasil litbang teknologi industri dan perlindungan terhadap pemanfaatan hasil inovasi teknologi.
- 3) Perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan paten hasil penelitian.
 - 4) Publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional.
 - 5) Kompetisi nasional untuk inovasi vokasi industri.

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem IKM.

Implementasi arah kebijakan ini dilakukan dengan dua strategi, yaitu:

- 1) Mengembangkan ekosistem industri kecil menengah.
- 2) Membangun kemitraan.

Adapun jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan di politeknik/akademi komunitas antara lain:

- a. pendampingan teknologi;
- b. pelatihan;
- c. pelayanan konsultasi industri; dan
- d. penyuluhan.

4. Mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pembangunan satelit PIDI 4.0.

Pengembangan pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui penyiapan politeknik dan akademi komunitas sebagai *showcase center* dan *capability center* industri 4.0 khususnya untuk industri kecil dan menengah. Arah kebijakan ini diselenggarakan dengan dua strategi, yaitu:

- 1) Pembangunan satelit PIDI 4.0.
- 2) Implementasi kurikulum dan modul pembelajaran 4.0.

5. Membangun kelembagaan inkubator bisnis industri yang terintegrasi.

Unit pendidikan tinggi di Kemenperin memiliki tugas tidak hanya untuk menciptakan tenaga kerja kompeten, tetapi juga menghasilkan wirausaha industri. Untuk mewujudkan ini, maka perlu dibangun inkubator bisnis yang terintegrasi. Program Inkubator Bisnis merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada peserta inkubasi (*tenant*). *Tenant* inkubator bisnis di perguruan tinggi adalah mahasiswa tingkat akhir yang telah memiliki prospektif usaha. Dalam penyelenggaraannya, politeknik/akademi komunitas perlu berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, BDI, asosiasi industri, dan pihak terkait lainnya.

Saat ini seluruh politeknik pendidikan vokasi Kemenperin memiliki program inkubator bisnis dengan beragam spesialisasi komoditi industri yang dikembangkan. Selain itu, berbagai K/L juga memiliki program penyiapan wirausaha yang dapat dikolaborasikan. Di Kemenperin sendiri, upaya penciptaan wirausaha baru banyak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka dalam bentuk bimbingan, pendampingan dan bantuan peralatan. Penyelenggaraan inkubator bisnis yang mencakup fase pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi dapat dilakukan berkolaborasi dengan pihak-pihak tersebut.

6. Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi LSP.

Saat ini hampir seluruh politeknik dan akademi komunitas telah memiliki LSP Pihak 1 dengan skema sertifikasi sesuai dengan bidang keahlian yang diselenggarakan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan. Hal-hal yang perlu dilakukan politeknik dan akademi komunitas dalam mengembangkan perangkat sertifikasi kompetensi adalah:

- 1) Pengembangan skema sertifikasi.
- 2) Mengembangkan Materi Uji Kompetensi (MUK).
- 3) Penguatan asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi.
- 4) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

7. Mengembangkan kelas industri.

Kelas industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis sesuai standar industri tertentu yang akan langsung bekerja pada industri. Penyiapan kelas industri dilakukan melalui program pendidikan setara D1/D2 dan kelas khusus program pendidikan D3/D4.

3.1.2. Penguatan Kelembagaan SMK Industri

Untuk memperkuat kelembagaan SMK industri, BPSDMI memiliki lima arah kebijakan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan *dual system* dengan *STEM learning model* berstandar global.

Strategi implementasi arah kebijakan ini akan menyorot tiga aspek, yaitu:

- 1) Pendidikan sistem ganda (*dual system education*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri. Untuk mewujudkan pendidikan sistem ganda, tahapan yang wajib dilakukan antara lain:
 - a. peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
 - b. penerapan kurikulum *link and match* dengan industri;
 - c. revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d. penerapan *teaching factory/teaching industry*;
 - e. peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi;
 - f. penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi;
- 2) Pengembangan laboratorium *teaching factory* dan lokakarya (*workshop*) terintegrasi melalui:
 - a. kemitraan strategis dengan DUDI;
 - b. penataan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. lingkungan kampus.
- 3) Model pembelajaran STEM (*science, technology, engineering, and mathematics*) yang mengintegrasikan empat bidang dalam sekali pengalaman belajar. Model ini diterapkan dalam perkuliahan/pembelajaran agar dapat mendorong siswa untuk mendesain, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi; mengasah kognitif, manipulatif dan afektif; serta mengaplikasikan pengetahuan. Pembelajaran berbasis STEM dapat melatih mahasiswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk membuat desain sebagai bentuk pemecahan masalah terkait lingkungan dengan memanfaatkan teknologi.

- 4) Pengembangan pendidikan bertaraf internasional. Pengembangan pendidikan bertaraf internasional sangat diperlukan sebagai "*proof of concept*" yang menegaskan bahwa pendidikan nasional telah setara dengan dunia internasional agar dapat membangun reputasi dan bagian upaya "*international alignment*". Pengembangan pendidikan bertaraf internasional juga merupakan salah satu media strategis karena langsung menunjukkan kualitas *outcome* pendidikan.
- 5) Pengembangan *smart* dan *cyber school*, yaitu komunitas pengetahuan yang kreatif dan berjiwa wirausaha (*creative-entrepreneurial knowledge community*), sehingga komunitas sekolah menjadi cerdas dalam mencapai tujuan akademisnya berkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui *smart school*, komunitas, program dan aktivitas, fasilitas fisik, dan sumber daya berada dalam fungsi *cyber*. Dalam fungsi *cyber* ini, diharapkan dapat menyediakan layanan informasi, komputasi, dan komunikasi secara terintegrasi pada semua anggota komunitas sekolah.

2. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem IKM.

Dalam upaya pengembangan kompetensi, SMK diharapkan dapat terlibat pengembangan ekosistem IKM. Kerja sama dengan IKM dilakukan dengan pola saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kerja sama diselenggarakan dalam rangka:

- menggali dan memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan;
- melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan diutamakan berupa pemanfaatan hasil penelitian secara konkret;
- mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang memadai.

Jenis kerja sama yang dapat diterapkan di SMK adalah sebagai berikut:

- 1) Pendampingan teknologi
- 2) Pelatihan
- 3) Pelayanan konsultasi industri
- 4) Penyuluhan

3. Mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pembangunan satelit PIDI 4.0.

Pengembangan pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui penyiapan politeknik dan akademi komunitas sebagai *showcase center* dan *capability center* industri 4.0 khususnya untuk industri kecil dan menengah. Arah kebijakan ini diselenggarakan dengan dua strategi, yaitu:

- 1) Pembangunan satelit PIDI 4.0.
- 2) Implementasi kurikulum dan modul pembelajaran 4.0.

4. Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi LSP.

Saat ini hampir seluruh SMK telah memiliki LSP Pihak 1 dengan skema sertifikasi sesuai dengan bidang keahlian yang diselenggarakan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan. Hal-hal yang perlu dilakukan SMK dalam mengembangkan perangkat sertifikasi kompetensi adalah:

- 1) Pengembangan skema sertifikasi.
- 2) Mengembangkan Materi Uji Kompetensi (MUK).
- 3) Penguatan asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi.

4) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

5. Mengembangkan kelas industri.

Kelas industri merupakan kelas khusus yang diselenggarakan bekerjasama dengan industri dengan tujuan membekali calon tenaga kerja atau lulusan dengan keahlian terapan atau keterampilan teknis yang diperlukan untuk bidang pekerjaan tertentu.

3.1.3. Penguatan Kelembagaan Balai Diklat Industri

Untuk memperkuat kelembagaan Balai Diklat Industri (BDI), BPSDMI memiliki delapan arah kebijakan, yaitu:

1. Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri

Sejalan dengan perkembangan industri nasional dan global serta mempertimbangkan tugas pokok BDI, maka kompetensi BDI dalam menyelenggarakan diklat bagi SDM industri perlu terus dikembangkan. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan kompetensi tenaga kerja industri dari sisi jenjang/level/jabatan (okupasi) serta jumlah tenaga kerja. Langkah pemetaan tersebut dilakukan untuk:

- mendapatkan potret kebutuhan tenaga kerja Industri dari 7 (tujuh) sektor industri prioritas serta pola peningkatan kualitas SDM industri yang dibutuhkan.
- mengetahui potret kekuatan internal BDI dalam melaksanakan pelatihan untuk menjawab potret kebutuhan tersebut.

2. Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) merupakan salah satu model program pengembangan SDM industri dilaksanakan sejak tahun 2016 BDI. PBK dilakukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja industri agar sesuai dengan kebutuhan pada sektor industri terkait. Sehingga, tercipta *link and match* antara *supply* tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. PBK menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap berdasarkan standar kompetensi yang diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing. Dengan ditetapkannya ruang lingkup dan spesialisasi BDI, masing-masing BDI harus melengkapi program dan modul pelatihan berbasis kompetensi agar dapat melaksanakan amanah pelatihan vokasi industri dengan sistem *3-in-1* (pelatihan, uji kompetensi, dan penempatan pada sektor industri).

3. Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi (*skilling, upskilling, dan re-skilling*) tenaga kerja industri dengan sistem *3-in-1*

Penyelenggaraan pelatihan vokasi industri di BDI dilakukan dengan sistem *3-in-1*, yaitu pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan penempatan lulusan pelatihan. Untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi industri dengan sistem *3-in-1*, langkah yang perlu dilakukan BDI yaitu:

- 1) *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama dengan industri
- 2) Rekrutmen peserta pelatihan
- 3) Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi
- 4) Penempatan kerja

- 5) *Tracer study* alumni peserta pelatihan

4. Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP

Saat ini seluruh BDI telah memiliki LSP Pihak 1 dengan skema sertifikasi sesuai jenis diklat yang dilakukan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan diklat, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan. Hal-hal yang perlu dilakukan BDI dalam mengembangkan perangkat sertifikasi kompetensi antara lain:

- 1) Pengembangan skema sertifikasi
- 2) Mengembangkan Materi Uji Kompetensi (MUK)
- 3) Penguatan asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi
- 4) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 5) Sistem digitalisasi uji kompetensi

5. Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional

Selain menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui LSP yang telah dilisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) seperti yang selama ini dilakukan, BDI perlu melakukan penajakan kerja sama dengan sertifikasi yang berlaku di negara lain ataupun diakui secara internasional. Ke depan, BDI diharapkan dapat menjadi *Authorized Training Body* (ATB) pada sektor-sektor industri sesuai spesialisasi kompetensinya. Langkah yang dapat dilakukan BDI untuk mencapai hal tersebut, yaitu:

- 1) Identifikasi standar kompetensi internasional
- 2) Identifikasi lembaga sertifikasi internasional
- 3) Kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional

6. Membangun sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis

Selain fokus pada penyiapan tenaga kerja industri kompeten, BDI juga berperan dalam penyiapan wirausaha industri melalui jalur inkubator bisnis. Penyelenggaraan inkubator bisnis di BDI harus tetap mempertimbangkan spesialisasi kompetensi serta kompetensi inti yang terdapat di wilayahnya. Tahapan pengembangan inkubator bisnis yang dapat dilakukan BDI adalah:

- 1) Menjalin kemitraan dengan asosiasi, pelaku industri, politeknik, dan K/L terkait sebagai akselerator pengembangan inkubator bisnis vokasi industri.
- 2) Mendorong peserta pelatihan menjadi wirausaha.
- 3) Memfasilitasi kemitraan dengan industri besar.
- 4) Pengembangan fasilitas inkubator bisnis.
- 5) Pengembangan SDM inkubator bisnis (*coach, trainer, pengelola*).

7. Membangun *smart training facility*

Pelatihan yang diselenggarakan bagi para SDM industri sudah sepatutnya perlu disesuaikan dengan era industri 4.0 yang menjadi tren global maupun nasional. Untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bagi industri 4.0, dimulai dengan membangun fasilitas pelatihan yang cerdas (*smart training facility*). *Smart training facility* memanfaatkan teknologi terkini sebagai fasilitas penyelenggaraan pelatihan. Ragam komponen *smart training facility* yang dimaksudkan mencakup *smart infrastructure* (perangkat), *smart classroom*, dan

smart monitoring peserta pelatihan. Dalam membangun *smart training facility*, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh BDI, yaitu:

- 1) Mengembangkan infrastruktur berbasis *smart*/industri 4.0.
- 2) Mengembangkan model *smart training*.
- 3) Mengembangkan *Learning Management System* (LMS) yang terintegrasi.

8. Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian

Pembina industri merupakan salah satu unsur SDM industri selain tenaga kerja industri dan wirausaha industri. Kebijakan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang telah diambil pemerintah berdampak pada peningkatan kebutuhan pelatihan pada setiap jenjang jabatan fungsional. Arah kebijakan pengembangan dan pembinaan pembina industri baik di tingkat pusat maupun daerah telah disusun oleh Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklat) SDM Aparatur Kementerian Perindustrian. Sebagai unit kerja pelatihan yang dimiliki Kemenperin, BDI juga mendapatkan mandate untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pembina industri pusat dan daerah, khususnya bagi jabatan fungsional yang berada di lingkungan Kemenperin. Langkah yang dilakukan BDI sebagai penyelenggara pelatihan bagi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu:

- 1) Rekrutmen peserta
- 2) Penyiapan tenaga pengajar
- 3) Penyiapan sarana prasana
- 4) Penyiapan Tempat Uji Kompetensi bagi pejabat fungsional

3.2. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang dapat memfasilitasi dan mendorong upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kerangka Regulasi BPSDMI 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Rpermen Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	2022
2	Rpermen Pengembangan SMK Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan BNSP	2022
3	Rpermen Pengembangan Lembaga Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin, Kemenaker, dan BNSP	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
4	Rpermen Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Kemendikbudristek dan BNSP	2022
5	Rpermen Pengelolaan Inkubator Industri Berbasis Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin, Kemenaker, BNSP	2022
6	Rpermen Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi dengan Sistem <i>3-in-1</i>	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin	2022
7	Rpermen Pengembangan ASN Industri Berbasis Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)	2022

3.3. Kerangka Kelembagaan

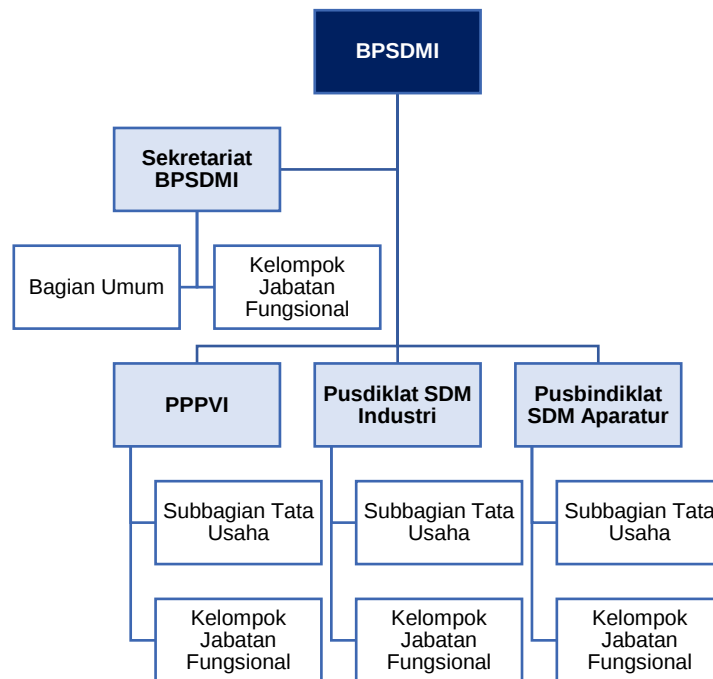
Dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki, tujuan UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, serta visi misi dan Nawa Cita Kabinet Kerja 2020-2024, beberapa hal pokok yang menjadi implikasi utama pada keorganisasian perindustrian, yaitu:

1. Pentingnya mengintegrasikan pembangunan industri dari hulu ke hilir dalam rangka penguatan struktur industri melalui pendekatan rantai pasokan dalam penciptaan nilai tambah (*supply-value chain*);
2. Pentingnya mengembangkan industri pendukung (*supporting industry*) yang efektif yang untuk penguatan struktur industri; dapat diperankan oleh IKM;
3. Pentingnya penyebaran industri ke luar Jawa melalui pendekatan perwilayahan untuk mengoptimalkan rantai pasokan dalam penciptaan nilai tambah dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam nasional yang tersebar;
4. Pentingnya peningkatan potensi kolaborasi dalam rantai pasokan global (*global supply chain*); dan
5. Pentingnya dukungan dan penguasaan teknologi untuk percepatan pembangunan industri terutama dalam penciptaan nilai tambah tanpa mengabaikan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap lima implikasi tersebut di atas, maka BPSDMI mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Permenperin No. 7/2021, BPSDMI menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
2. pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sumber daya manusia industri;
4. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun kerangka struktur kelembagaan BPSDMI adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Struktur Kelembagaan BPSDMI
Sumber: Diolah dari Permenperin No. 7/2021

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian yang dijabarkan pada Bab 3 serta struktur organisasi. Sasaran program yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa kegiatan. Berikut ini Indikator Kinerja Program BSPDMI 2020-2024:

Tabel 3. Target Kinerja BSPDMI 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2021	2022	2023	2024
Tj	Meningkatnya peran SDM industri dalam perekonomian nasional							
		Tersedia SDM industri yang kompeten	orang					
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas							
	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94
		Sekretariat BPSDMI		17,44	18,29	20,84	21,34	21,94
	2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65
		Sekretariat BPSDMI		13,58	13,96	14,96	15,26	15,65
	3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Rp Juta /orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73
		Sekretariat BPSDMI		111,66	115,46	115,77	120,38	124,73
	4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	17000	43000	27600	95000	100000
		Pusat SDM Industri		1780	450	3100	7500	8000
		BDI Medan		1070	3150	2100	10500	11000
		BDI Padang		1510	3950	2200	10700	11500
		BDI Jakarta		3750	12300	4000	15000	15500
		BDI Yogyakarta		3450	10250	4500	15500	16300
		BDI Surabaya		2970	8000	3500	13500	14200
		BDI Makassar		1480	3100	4200	13500	14000
		BDI Denpasar		990	1800	2100	8800	9500
	5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83
		PPPVI		50	77	79	81	83
		SMAK Bogor		50	77	79	81	83

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2021	2022	2023	2024
		SMAK Padang		50	76	78	79	81
		SMAK Makassar		50	75	77	79	81
		SMTI Banda Aceh		50	77	79	80	81
		SMTI Makassar		50	77	79	80	81
		SMTI Yogyakarta		50	76	78	79	80
		SMTI Bandar Lampung		50	77	79	80	81
		SMTI Padang		50	76	78	79	81
		SMTI Pontianak		50	77	79	80	81
		Politeknik STMI Jakarta		50	85	87	88	89
		Politeknik STTT Bandung		50	85	86	87	88
		Politeknik AKA Bogor		50	82	84	85	86
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		50	83	85	86	87
		Politeknik ATI Padang		50	68	72	75	80
		Politeknik ATK Yogyakarta		50	73	75	77	80
		Politeknik APP Jakarta		50	72	74	77	80
		Politeknik ATI Makassar		50	74	76	78	81
		Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		50	84	86	87	88
		Industri Logam Morowali		50	80	82	83	84
		Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		-	-	80	82	84
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		50	84	86	87	88
SP2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>							
	1	SDM industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Orang	400	400	400	400	400
		Pusat SDM Industri		400	400	400	400	400
	2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1	3	5	7	9
		SMAK Bogor		0	1	1	1	1
		SMAK Padang		1	1	1	1	1
		SMAK Makassar		0	1	1	1	1
		SMTI Banda Aceh		1	1	1	1	1
		SMTI Makassar		0	1	1	1	1
		SMTI Yogyakarta		1	1	1	1	1
		SMTI Bandar Lampung		0	1	1	1	1
		SMTI Padang		1	1	1	1	1

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2021	2022	2023	2024
		SMTI Pontianak		1	1	1	1	1
		Politeknik STMI Jakarta		1	1	1	1	1
		Politeknik STTT Bandung		1	1	1	1	1
		Politeknik AKA Bogor		1	1	1	1	1
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		1	1	1	1	1
		Politeknik ATI Padang		1	1	1	1	1
		Politeknik ATK Yogyakarta		1	2	2	2	2
		Politeknik APP Jakarta		1	1	1	1	1
		Politeknik ATI Makassar		0	1	1	1	1
		Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		1	1	1	1	1
		Industri Logam Morowali		0	1	1	1	1
		Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		0	1	1	1	1
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		1	1	1	1	1
	3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	Persen	30	50	70	90	95
		PPPVI		30	50	-	-	-
		Pusat SDM Industri		-	-	70	90	95
SP3		Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian						
	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	80	82	85	87	90
		Pusat SDM Aparatur		80	82	85	87	90
	2	Efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional	Persen	0	70	75	80	85
		Pusat SDM Aparatur		0	70	75	80	85
SP4		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan						
	1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	SKKNI	8	8	10	10	10
		Pusat SDM Industri		8	8	10	10	10
	2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri	LSP dan TUK	5	6	20	20	20
		Pusat SDM Industri		5	6	20	20	20
	3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	144	154	300	310	320
		Pusat SDM Industri		144	154	300	310	320
	4	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan	4	6	8	10	12
		PPPVI		4	6	8	10	12
		SMAK Bogor		0	1	2	2	2
		SMAK Padang		0	0	1	1	1

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2021	2022	2023	2024
		SMAK Makassar		0	1	1	1	1
		SMTI Banda Aceh		0	1	1	1	1
		SMTI Makassar		0	0	1	1	1
		SMTI Yogyakarta		0	1	1	1	1
		SMTI Bandar Lampung		0	1	1	1	1
		SMTI Padang		0	1	2	2	2
		SMTI Pontianak		1	0	1	1	1
		Politeknik STMI Jakarta		0	2	3	3	3
		Politeknik STTT Bandung		0	2	3	3	3
		Politeknik AKA Bogor		1	2	3	3	3
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		1	1	1	1	1
		Politeknik ATI Padang		1	2	3	3	3
		Politeknik ATK Yogyakarta		1	2	3	3	3
		Politeknik APP Jakarta		1	1	1	1	1
		Politeknik ATI Makassar		1	2	3	3	3
		Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		0	2	2	2	2
		Industri Logam Morowali		1	2	3	3	3
		Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		1	2	3	3	3
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		1	0	1	2	3
	5	Nilai minimum akreditasi program studi di politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)
		PPPVI		301	316	331	346	361
		Politeknik STMI Jakarta		280	290	301	346	361
		Politeknik STTT Bandung		330	342	364	365	365
		Politeknik AKA Bogor		301	325	345	346	361
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		290	300	306	346	361
		Politeknik ATI Padang		320	330	348	350	361
		Politeknik ATK Yogyakarta		290	300	312	346	361
		Politeknik APP Jakarta		295	315	325	346	361
		Politeknik ATI Makassar		301	322	336	346	361
		Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		201	301	305	346	361
		Industri Logam Morowali		201	205	250	346	361
		Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		201	211	211	346	361

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		201	202	205	346	361
	6	Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	100	120	150	170	200
		PPPVI		15	7	18	20	23
		Politeknik STMI Jakarta		10	15	16	18	21
		Politeknik STTT Bandung		10	15	16	18	21
		Politeknik AKA Bogor		10	12	15	17	20
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		3	4	5	7	10
		Politeknik ATI Padang		12	12	16	18	21
		Politeknik ATK Yogyakarta		15	15	20	21	23
		Politeknik APP Jakarta		5	5	10	12	15
		Politeknik ATI Makassar		25	27	29	30	31
		Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		3	3	3	5	7
		Industri Logam Morowali		3	9	12	14	16
		Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		3	6	6	8	10
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		2	3	6	8	10
	7	Inkubator bisnis industri yang tumbuh	Tenant	41	34	50	60	70
		BDI Medan		0	0	0	2	3
		BDI Padang		0	0	0	2	3
		BDI Jakarta		18	5	5	6	7
		BDI Yogyakarta		0	4	3	4	5
		BDI Surabaya		0	0	0	2	3
		BDI Makassar		7	9	10	11	12
		BDI Denpasar		16	16	21	22	23
		Politeknik STMI Jakarta		-	1	1	2	2
		Politeknik STTT Bandung		-	10	15	16	16
		Politeknik AKA Bogor		-	-	-	1	1
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		-	-	-	1	1
		Politeknik ATI Padang		-	-	-	1	1
		Politeknik ATK Yogyakarta		-	-	-	1	1
		Politeknik APP Jakarta		-	-	-	1	1
		Politeknik ATI Makassar		-	-	-	1	1
		Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		-	-	-	1	1

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Industri Logam Morowali		-	-	-	1	1
		Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		-	-	-	1	1
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		-	-	-	1	1
SP5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri							
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80
		Sekretariat BPSDMI		-	50	60	70	80
		Pusat SDM Aparatur		-	50	60	70	80
		Pusat SDM Industri		-	50	60	70	80
		PPPVI		-	50	60	70	80
		BDI Medan		-	50	60	70	80
		BDI Padang		-	50	60	70	80
		BDI Jakarta		-	50	60	70	80
		BDI Yogyakarta		-	50	60	70	80
		BDI Surabaya		-	50	60	70	80
		BDI Makassar		-	50	60	70	80
		BDI Denpasar		-	50	60	70	80
		SMAK Bogor		-	50	60	70	80
		SMAK Padang		-	50	60	70	80
		SMAK Makassar		-	50	60	70	80
		SMTI Banda Aceh		-	50	60	70	80
		SMTI Makassar		-	50	60	70	80
		SMTI Yogyakarta		-	50	60	70	80
		SMTI Bandar Lampung		-	50	60	70	80
		SMTI Padang		-	50	60	70	80
		SMTI Pontianak		-	50	60	70	80
		Politeknik STMI Jakarta		-	50	60	70	80
		Politeknik STTT Bandung		-	50	60	70	80
		Politeknik AKA Bogor		-	50	60	70	80
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		-	50	60	70	80
		Politeknik ATI Padang		-	50	60	70	80
		Politeknik ATK Yogyakarta		-	50	60	70	80
		Politeknik APP Jakarta		-	50	60	70	80

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Politeknik ATI Makassar		-	50	60	70	80
		Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		-	50	60	70	80
		Industri Logam Morowali		-	50	60	70	80
		Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		-	50	60	70	80
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		-	50	60	70	80
SP6	Terwujudnya Birokrasi BPSDMI yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
	1	Nilai laporan keuangan BPSDMI	Nilai	70	72	74	76	78
		Sekretariat BPSDMI		70	72	74	76	78
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) BPSDMI	Persen	70	72	74	76	78
		Sekretariat BPSDMI		70	72	74	76	78
	3	Nilai kearsipan BPSDMI	Nilai	0	75	77	79	80
		Sekretariat BPSDMI		0	75	77	79	80
SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian							
	1	Rata-rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BPSDMI	Indeks	70	71	73	76	80
		Sekretariat BPSDMI		70	71	73	76	80
		Pusat SDM Aparatur		70	71	73	76	80
		Pusat SDM Industri		70	71	73	76	80
		PPPVI		70	71	73	76	80
		BDI Medan		70	71	73	76	80
		BDI Padang		70	71	73	76	80
		BDI Jakarta		70	71	73	76	80
		BDI Yogyakarta		70	71	73	76	80
		BDI Surabaya		70	71	73	76	80
		BDI Makassar		70	71	73	76	80
		BDI Denpasar		70	71	73	76	80
		SMAK Bogor		70	71	73	76	80
		SMAK Padang		70	71	73	76	80
		SMAK Makassar		70	71	73	76	80
		SMTI Banda Aceh		70	71	73	76	80
		SMTI Makassar		70	71	73	76	80
		SMTI Yogyakarta		70	71	73	76	80
		SMTI Bandar Lampung		70	71	73	76	80

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2021	2022	2023	2024
		SMTI Padang		70	71	73	76	80
		SMTI Pontianak		70	71	73	76	80
		Politeknik STMI Jakarta		70	71	73	76	80
		Politeknik STTT Bandung		70	71	73	76	80
		Politeknik AKA Bogor		70	71	73	76	80
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		70	71	73	76	80
		Politeknik ATI Padang		70	71	73	76	80
		Politeknik ATK Yogyakarta		70	71	73	76	80
		Politeknik APP Jakarta		70	71	73	76	80
		Politeknik ATI Makassar		70	71	73	76	80
		Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		70	71	73	76	80
		Industri Logam Morowali		70	71	73	76	80
		Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		70	71	73	76	80
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		70	71	73	76	80
SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91	91,5	92	92,5	93
		Sekretariat BPSDMI		91	91,5	92	92,5	93
		Pusat SDM Aparatur		91	91,5	92	92,5	93
		Pusat SDM Industri		91	91,5	92	92,5	93
		PPPVI		91	91,5	92	92,5	93
		BDI Medan		91	91,5	92	92,5	93
		BDI Padang		91	91,5	92	92,5	93
		BDI Jakarta		91	91,5	92	92,5	93
		BDI Yogyakarta		91	91,5	92	92,5	93
		BDI Surabaya		91	91,5	92	92,5	93
		BDI Makassar		91	91,5	92	92,5	93
		BDI Denpasar		91	91,5	92	92,5	93
		SMAK Bogor		91	91,5	92	92,5	93
		SMAK Padang		91	91,5	92	92,5	93
		SMAK Makassar		91	91,5	92	92,5	93
		SMTI Banda Aceh		91	91,5	92	92,5	93
		SMTI Makassar		91	91,5	92	92,5	93

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2021	2022	2023	2024
		SMTI Yogyakarta		91	91,5	92	92,5	93
		SMTI Bandar Lampung		91	91,5	92	92,5	93
		SMTI Padang		91	91,5	92	92,5	93
		SMTI Pontianak		91	91,5	92	92,5	93
		Politeknik STMI Jakarta		91	91,5	92	92,5	93
		Politeknik STTT Bandung		91	91,5	92	92,5	93
		Politeknik AKA Bogor		91	91,5	92	92,5	93
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		91	91,5	92	92,5	93
		Politeknik ATI Padang		91	91,5	92	92,5	93
		Politeknik ATK Yogyakarta		91	91,5	92	92,5	93
		Politeknik APP Jakarta		91	91,5	92	92,5	93
		Politeknik ATI Makassar		91	91,5	92	92,5	93
		Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		91	91,5	92	92,5	93
		Industri Logam Morowali		91	91,5	92	92,5	93
		Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		91	91,5	92	92,5	93
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		91	91,5	92	92,5	93
	2	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Level	3	3	3	4	4
		Sekretariat BPSDMI		3	3	3	4	4
		BDI Medan		3	3	3	4	4
		BDI Padang		3	3	3	4	4
		BDI Jakarta		3	3	3	4	4
		BDI Yogyakarta		3	3	3	4	4
		BDI Surabaya		3	3	3	4	4
		BDI Makassar		3	3	3	4	4
		BDI Denpasar		3	3	3	4	4
		SMAK Bogor		3	3	3	4	4
		SMAK Padang		3	3	3	4	4
		SMAK Makassar		3	3	3	4	4
		SMTI Banda Aceh		3	3	3	4	4
		SMTI Makassar		3	3	3	4	4
		SMTI Yogyakarta		3	3	3	4	4
		SMTI Bandar Lampung		3	3	3	4	4

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru				
				2020	2021	2022	2023	2024
		SMTI Padang		3	3	3	4	4
		SMTI Pontianak		3	3	3	4	4
		Politeknik STMI Jakarta		3	3	3	4	4
		Politeknik STTT Bandung		3	3	3	4	4
		Politeknik AKA Bogor		3	3	3	4	4
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		3	3	3	4	4
		Politeknik ATI Padang		3	3	3	4	4
		Politeknik ATK Yogyakarta		3	3	3	4	4
		Politeknik APP Jakarta		3	3	3	4	4
		Politeknik ATI Makassar		3	3	3	4	4
		Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		3	3	3	4	4
		Industri Logam Morowali		3	3	3	4	4
		Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		3	3	3	4	4
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		3	3	3	4	4
SP9	Tersedianya Regulasi terkait SDM Industri yang Efektif							
	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	Persen	-	72	74	78	78
		Sekretariat BPSDMI		-	72	74	78	78

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat hukum yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di BPSDMI merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan.

4.2. Kerangka Pendanaan

Tabel 4. Kerangka Pendanaan BPSPMI 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Alokasi (dalam milyar rupiah)						Unit Terkait
			2019	2020	2022	2022	2023	2024	
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri									
SP1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas								
1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	0	0	0	0	0	0	Set. BPSPDMI
2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	0	0	0	0	0	0	Set. BPSPDMI
3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Rp Juta /orang/ tahun	0	0	0	0	0	0	Set. BPSPDMI
4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	139.021403	13.741571	8.351605	27	35	35	Pusdiklat SDM Industri dan BDI
5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan	Persen	5	3.728	4.6699	9.25622	10	12	PPPVI, SMK, dan Politeknik
SP2	Penguatan implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>								
1	SDM industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Orang			0.487395	4.2	10	10	Pusdiklat SDM Industri
2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1.7	0	0	0	0	0	PPPVI, SMK, dan Politeknik
3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	Persen	211.5558	47.154287	167.193984	52.408889	160	80	Pusdiklat industri dan PPPVI
SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian								
1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	17.406716	13.488987	7.584581	11.28339	44.334366	50	Pusbindiklat SDM Aparatur
2	Efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional	Persen	0	0.282655	2.388029	1.71661	10	10	Pusbindiklat SDM Aparatur
SP4	Terseleenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan								
1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	SKKNI	8.82845	2.685414	2.711667	3	8	8	Pusdiklat SDM Industri
2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji	LSP dan TUK	0.4619	0.5	0.532116	2	3	3	Pusdiklat SDM Industri

	Kompetensi (TUK) bidang industri								
3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	3.36675	1.88295	2	2	9.5	9.5	Pusdiklat SDM Industri
4	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan	26.087333	6.338215	2.874704	4.354584	5	5	PPPVI
5	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	2.759595	3.85636	3.165052	4.010146	5	5	PPPVI
6	Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	2.430973	2.077421	0.955018	2.4	3	3	PPPVI dan Politeknik/ Akom
7	Inkubator bisnis industri yang tumbuh	Tenant	0	0	0	0	0	0	Pusdiklat SDM Industri dan Politeknik/ Akom
SP5 Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri									
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Persen	217.38549	35.965637	97.868034	81.6096	96.806909	51.903456	Semua Unit Eselon II dan satker daerah di BPSDMI
SP6 Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima									
1	Nilai laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	0.936334	1.442173	1.100342	3.3615	4	4	Set. BPSDMI
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	4.013321	2.545148	3.834002	5.887707	5.25	5.25	Set. BPSDMI
3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Nilai	0.15838	0.13385	0.602531	0.806035	1	1	Set. BPSDMI
SP7 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian									
1	Rata-rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BPSDMI	Indeks	2.109735	1.17487	1.054132	2.343612	2.5	2.5	Set. BPSDMI
SP8 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien									
1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	0.429971	0.335406	0.372643	0.367578	0.5	0.5	Set. BPSDMI
2	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Level	0	0.08216	0.173149	0.12638	0.25	0.25	Set. BPSDMI
SP9 Tersedianya regulasi terkait SDM industri yang efektif									

	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	Persen	0	0.480327	0.581068	1.386388	1.5	1.5	Set. BPSDMI
	1	Tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Orang	8.9462	2	2.599852	3	15	15	Pusdiklat Industri
	1	Gaji, Tunjangan, dan Operasional		31.124763	30.695201	32.371346	42.573278	47	69.8	Set. BPSDMI

BAB 5

PENUTUP

Rencana strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 merupakan rencana kerja jangka menengah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi BPSDMI dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis tersebut juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi selama lima tahun. Penyusunan renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan *Key Performance Indicator* (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri akan ditinjau secara berkala setiap tahun dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan.

Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian visi dan misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pohon Kinerja

RENSTRA KEMENPERIN 2020-2024	TJ Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional				
	1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas				
RENSTRA BPSDMI 2020-2024	2. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas				
	SS1 Meningkatnya Daya Saing Industri Kemandirian Pengolahan Nonmigas	SS2 Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>	SS3 Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri	SS7 Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	SS8 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdasa Saing dan Berkelanjutan
	1. Tenaga kerja di sektor industri nonmigas 2. Persentase tenaga kerja di sektor industri nonmigas terhadap total pekerja 3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas 7. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerja dalam 1 tahun setelah kelulusan 8. Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi	1. SDM industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	1. Efektivitas kebijakan industri 2. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan	1. Infrastruktur kompetensi industri
RENSTRA BPSDMI 2020-2024	TJ Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh				
	1. Tersedianya SDM Industri yang kompeten				
	SP1 Meningkatnya Daya Saing Industri Kemandirian Pengolahan Nonmigas	SP2 Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>	SP3 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	SP4 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	SP5 Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
	1. Tenaga kerja di sektor industri nonmigas 2. Persentase tenaga kerja di sektor industri nonmigas terhadap total pekerja 3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas 4. Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi 5. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	1. SDM industri 4.0 yang meningkat kompetensinya 2. Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi 3. Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0	1. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik 2. Efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional	1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 2. Fasilitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) Bidang Industri 3. Asesor kompetensi dan lisensi 4. Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat 5. Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik 6. Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional 7. Indikator industri yang tumbuh	1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa BPSDMI
	SP6 Terwujudnya Birokrasi BPSDMI yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	SP7 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	SP8 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	SP9 Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	
	1. Nilai laporan keuangan BPSDMI 2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah BPSDMI 3. Nilai kearsipan BPSDMI	1. Rata-rata indeks kompetensi, profesional ASN BPSDMI	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti 2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	1. Efektivitas regulasi terkait SDM industri	

Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Kerja

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri														
SP1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas													
	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94						Set. BPSDMI
	2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65						Set. BPSDMI
	3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Rp Juta /orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73						Set. BPSDMI
	4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	17000	43000	27600	95000	100000						Pusdiklat SDM Industri dan BDI
	5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83						PPPVI, SMK, dan Politeknik
SP2	Penguatan implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>													
	1	SDM industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Orang	400	400	400	400	400						Pusdiklat SDM Industri
	2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1	3	5	7	9						PPPVI, SMK, dan Politeknik
	3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	Persen	30	50	70	90	95						Pusdiklat industri dan PPPVI
SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian													
	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	80	82	85	87	90						Pusbindiklat SDM Aparatur
	2	Efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional	Persen	0	70	75	80	85						Pusbindiklat SDM Aparatur

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP4	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan													
	1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	SKKNI	8	8	10	10	10						Pusdiklat SDM Industri
	2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri	LSP dan TUK	5	6	20	20	20						Pusdiklat SDM Industri
	3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	144	154	300	310	320						Pusdiklat SDM Industri
	4	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan	4	6	8	10	12						PPPMI
	5	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)						PPPMI
	6	Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	100	120	150	170	200						PPPMI dan Politeknik/Akom
	7	Inkubator bisnis industri yang tumbuh	Tenant	41	34	50	60	70						Pusdiklat SDM Industri dan Politeknik/Akom
SP5	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80						Semua Unit Eselon II dan satker daerah di BPSDMI
SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima													
	1	Nilai laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	76	78						Set. BPSDMI
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	76	78						Set. BPSDMI
	3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Nilai	0	75	77	79	80						Set. BPSDMI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian													
	1	Rata-rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BPSDMI	Indeks	70	71	73	76	80						Set. BPSDMI
SP8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien													
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91	91,5	92	92,5	93						Set. BPSDMI
	2	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Level	3	3	3	4	4						Set. BPSDMI
SP9	Tersedianya regulasi terkait SDM industri yang efektif													
	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	Persen	-	72	74	78	78						Set. BPSDMI
Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri									41,52	137,96	64,25	123,03	123,03	
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas													
	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94						Set. BPSDMI
	2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65						Set. BPSDMI
	3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Rp Juta /orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73						Set. BPSDMI
SK2	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri													
	1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Indeks	70	71	73	76	80						Set. BPSDMI
SK3	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	76	78						Set. BPSDMI
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	76	78						Set. BPSDMI
	3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Nilai	0	75	77	79	80						Set. BPSDMI
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80						Set. BPSDMI
SK5	Tersedianya Regulasi terkait SDM Industri yang Efektif													
	1	Efektivitas Regulasi terkait SDM Industri	Persen	-	72	74	78	78						Set. BPSDMI
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91	91,5	92	92,5	93						Set. BPSDMI
	2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4						Set. BPSDMI
Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur									13,77	16,00	13,00	24,89	24,89	
SK1	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Kompeten dan Profesional													
	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	Persen	-	80	82	85	87						Pusbindiklat SDM Aparatur
	2	Efektivitas pelaksanaan pembinaan JF	Persen	-	70	75	80	85						Pusbindiklat SDM Aparatur

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Bidang Industri Melalui Pendidikan dan Pelatihan													
	1	Persentase SDM yang kompeten melalui pelatihan	Persen		90	92	93	95						Pusbindiklat SDM Aparatur
	2	Akreditasi kelembagaan pelatihan manajerial	Predikat	-	B	B	B	BB						Pusbindiklat SDM Aparatur
	3	Ketepatan waktu kelulusan peserta program pendidikan Formal	Persen	-	80	82	85	87						Pusbindiklat SDM Aparatur
SK3	Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional													
	1	Peningkatan penetapan angka kredit	Persen	-	75	77	80	83						Pusbindiklat SDM Aparatur
	2	Efektivitas Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional	Persen	-	75	80	82	85						Pusbindiklat SDM Aparatur
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	-	50	60	70	80						Pusbindiklat SDM Aparatur
SK5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93						Pusbindiklat SDM Aparatur
SK6	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	-	72	75	77	80						Pusbindiklat SDM Aparatur
	2	Nilai Kearsipan	Nilai	-	68	70	72	75						Pusbindiklat SDM Aparatur
	3	Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Pusbindiklat SDM Aparatur	Nilai	-	71	73	76	80						Pusbindiklat SDM Aparatur

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri									20,81	36,47	79,36	151,97	151,97	
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas													
	1	Tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Orang	3580	4900	1500	20000	20000						Pusdiklat Industri
	2	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	1780	450	3100	7500	8000						Pusdiklat Industri
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0													
	1	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Orang	400	400	400	400	400						Pusdiklat Industri
	2	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	Persen	NA	NA	70	90	95						Pusdiklat Industri
SK3	Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Kompetensi Industri													
	1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang industri	SKKNI	8	8	10	10	10						Pusdiklat Industri
	2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri	LSP dan TUK	5	6	20	20	20						Pusdiklat Industri
	3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	144	154	300	310	320						Pusdiklat Industri
	4	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	Tenant	41	34	50	60	70						Pusdiklat Industri
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker daerah di lingkungan BPSPDMI	Persen	-	50	60	70	80						Pusdiklat Industri

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK5	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri													
	1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Indeks	70	71	73	76	80						Pusdiklat Industri
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91	91,5	92	92,5	93						Pusdiklat Industri
SK7	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	76	78						Pusdiklat Industri
Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri									94,49	210,31	108,80	208,34	208,34	
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas													
	1	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83						PPPVI
	2	Tenaga kerja industri yang kompeten	Persen	500	500	500	500	500						
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0													
	1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1	3	5	7	9						PPPVI
SK3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan													
	1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan/ Industri	4	6	8	10	12						PPPVI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	5	7	18	23	28						PPPVI
	3	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)						PPPVI
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker daerah di lingkungan BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80						PPPVI
SK5	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri													
	1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Indeks	70	71	73	76	80						PPPVI
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91	91,5	92	92,5	93						PPPVI
SK7	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	76	78						PPPVI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK			Satuan						Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
BDI, SMK, Poltek dan Akom									94,49	210,31	108,80	208,34	208,34		
SK1	Meningkatnya daya saing Tenaga Kerja Industri														
	1	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	16.010	42.500	22.600	77.000	81.000						BDI	
		BDI Medan		1.780	3.150	2.100	10.500	11.000							
		BDI Padang		1.070	3.950	2.200	10.700	11.500							
		BDI Jakarta		1.510	12.300	4.000	15.000	15.500							
		BDI Yogyakarta		3.750	10.250	4.500	15.500	16.300							
		BDI Surabaya		3.450	8.000	3.500	13.500	14.200							
		BDI Makassar		2.970	3.100	4.200	13.500	14.000							
		BDI Denpasar		1.480	1.800	2.100	8.800	9.500							
	2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83						SMK dan Poltek	
		SMAK Bogor		50	77	79	81	83							
		SMAK Padang		50	76	78	79	81							
		SMAK Makassar		50	75	77	79	81							
		SMTI Banda Aceh		50	77	79	80	81							
		SMTI Makassar		50	77	79	80	81							
		SMTI Yogyakarta		50	76	78	79	80							
		SMTI Bandar Lampung		50	77	79	80	81							
		SMTI Padang		50	76	78	79	81							
		SMTI Pontianak		50	77	79	80	81							
		Politeknik STMI Jakarta		50	85	87	88	89							
		Politeknik STTT Bandung		50	85	86	87	88							
		Politeknik AKA Bogor		50	82	84	85	86							
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		50	83	85	86	87							
		Politeknik ATI Padang		50	68	72	75	80							
		Politeknik ATK Yogyakarta		50	73	75	77	80							
		Politeknik APP Jakarta		50	72	74	77	80							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK	Satuan						Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Politeknik ATI Makassar		50	74	76	78	81						
	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		50	84	86	87	88						
	Industri Logam Morowali		50	80	82	83	84						
	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		-	-	80	82	84						
	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		50	84	86	87	88						
3	Tenaga kerja industri yang kompeten	Orang	24320	24420	24570	24820	24420						SMK dan Poltek
	PPPVI		500	500	500	500	500						
	SMAK Bogor		1357	1380	1382	1406	1423						
	SMAK Padang		1284	1244	1254	1259	1264						
	SMAK Makassar		937	977	982	987	992						
	SMTI Banda Aceh		850	928	1026	1031	1036						
	SMTI Makassar		798	972	978	983	988						
	SMTI Yogyakarta		1123	1276	1282	1287	1292						
	SMTI Bandar Lampung		1136	1143	1145	1150	1155						
	SMTI Padang		703	708	740	745	750						
	SMTI Pontianak		1020	1133	1140	1145	1150						
	Politeknik STMI Jakarta		1647	1600	1620	1625	1630						
	Politeknik STTT Bandung		1803	1650	1700	1705	1710						
	Politeknik AKA Bogor		1575	1664	1580	1585	1590						
	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		1529	1346	1404	1360	1365						
	Politeknik ATI Padang		1980	1911	1816	1821	1826						
	Politeknik ATK Yogyakarta		1254	1145	1191	1196	1201						
	Politeknik APP Jakarta		1820	1840	1607	1612	1617						
	Politeknik ATI Makassar		1473	1237	1447	1452	1457						
	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		723	550	485	490	495						
	Industri Logam Morowali		371	351	553	558	563						
	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		420	561	612	617	622						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan						Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		303	365	369	374	379						
SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan													
	1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan/ Industri	4	6	11	13	15						SMK dan Poltek
		SMAK Bogor		0	1	2	2	2						
		SMAK Padang		0	0	1	1	1						
		SMAK Makassar		0	1	1	1	1						
		SMTI Banda Aceh		0	1	1	1	1						
		SMTI Makassar		0	0	1	1	1						
		SMTI Yogyakarta		0	1	1	1	1						
		SMTI Bandar Lampung		1	1	1	1	1						
		SMTI Padang		0	1	2	2	2						
		SMTI Pontianak		0	0	1	1	1						
		Politeknik STMI Jakarta		1	2	3	3	3						
		Politeknik STTT Bandung		1	2	3	3	3						
		Politeknik AKA Bogor		1	2	3	3	3						
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		1	1	1	1	1						
		Politeknik ATI Padang		1	2	3	3	3						
		Politeknik ATK Yogyakarta		1	2	3	3	3						
		Politeknik APP Jakarta		0	1	1	1	1						
		Politeknik ATI Makassar		1	2	3	3	3						
		Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		1	2	2	2	2						
		Industri Logam Morowali		1	2	3	3	3						
		Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		1	2	3	3	3						
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		0	0	1	2	3						
	2	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	100	120	150	170	200						Poltek
		Politeknik STMI Jakarta		10	15	16	18	21						
		Politeknik STTT Bandung		10	15	16	18	21						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK	Satuan						Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Politeknik AKA Bogor		10	12	15	17	20						
	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		3	4	5	7	10						
	Politeknik ATI Padang		12	12	16	18	21						
	Politeknik ATK Yogyakarta		15	15	20	21	23						
	Politeknik APP Jakarta		5	5	10	12	15						
	Politeknik ATI Makassar		25	27	29	30	31						
	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		3	3	3	5	7						
	Industri Logam Morowali		3	9	12	14	16						
	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		3	6	6	8	10						
	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		2	3	6	8	10						
	3 Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)						Poltek
	Politeknik STMI Jakarta		280	290	301	346	361						
	Politeknik STTT Bandung		330	342	364	365	365						
	Politeknik AKA Bogor		301	325	345	346	361						
	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		290	300	306	346	361						
	Politeknik ATI Padang		320	330	348	350	361						
	Politeknik ATK Yogyakarta		290	300	312	346	361						
	Politeknik APP Jakarta		295	315	325	346	361						
	Politeknik ATI Makassar		301	322	336	346	361						
	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		201	301	305	346	361						
	Industri Logam Morowali		201	205	250	346	361						
	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		201	211	211	346	361						
	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		201	202	205	346	361						
	4 Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional	Sertifikasi	-	-	-	2 (kumulatif)	7 (kumulatif)						BDI
	BDI Medan		-	-	-		1						
	BDI Padang		-	-	-		1						
	BDI Jakarta		-	-	-		1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan						Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		BDI Yogyakarta		-	-	-		1						
		BDI Surabaya		-	-	-	1	1						
		BDI Makassar		-	-	-	-	1						
		BDI Denpasar		-	-	-	1	1						
	5	Inkubator industri yang tumbuh	Tenant	41	34	50	60	70						BDI dan Poltek
		BDI Medan		0	0	0	2	3						
		BDI Padang		0	0	0	2	3						
		BDI Jakarta		18	5	5	6	7						
		BDI Yogyakarta		0	4	3	4	5						
		BDI Surabaya		0	0	0	2	3						
		BDI Makassar		7	9	10	11	12						
		BDI Denpasar		16	16	21	22	23						
		Politeknik STMI Jakarta		-	1	1	2	2						
		Politeknik STTT Bandung		-	10	15	16	16						
		Politeknik AKA Bogor		-	-	-	1	1						
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		-	-	-	1	1						
		Politeknik ATI Padang		-	-	-	1	1						
		Politeknik ATK Yogyakarta		-	-	-	1	1						
		Politeknik APP Jakarta		-	-	-	1	1						
		Politeknik ATI Makassar		-	-	-	1	1						
		Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		-	-	-	1	1						
		Industri Logam Morowali		-	-	-	1	1						
		Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		-	-	-	1	1						
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		-	-	-	1	1						
SK3	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0													
	1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1	3	5	7	9						SMK dan Poltek
		SMAK Bogor		0	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan						Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		SMAK Padang		1	1	1	1	1						
		SMAK Makassar		0	1	1	1	1						
		SMTI Banda Aceh		1	1	1	1	1						
		SMTI Makassar		0	1	1	1	1						
		SMTI Yogyakarta		1	1	1	1	1						
		SMTI Bandar Lampung		0	1	1	1	1						
		SMTI Padang		1	1	1	1	1						
		SMTI Pontianak		1	1	1	1	1						
		Politeknik STMI Jakarta		1	1	1	1	1						
		Politeknik STTT Bandung		1	1	1	1	1						
		Politeknik AKA Bogor		1	1	1	1	1						
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		1	1	1	1	1						
		Politeknik ATI Padang		1	1	1	1	1						
		Politeknik ATK Yogyakarta		1	2	2	2	2						
		Politeknik APP Jakarta		1	1	1	1	1						
		Politeknik ATI Makassar		0	1	1	1	1						
		Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		1	1	1	1	1						
		Industri Logam Morowali		0	1	1	1	1						
		Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		0	1	1	1	1						
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		1	1	1	1	1						
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker daerah di lingkungan BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80						BDI, SMK, dan Poltek
		BDI Medan		-	50	60	70	80						
		BDI Padang		-	50	60	70	80						
		BDI Jakarta		-	50	60	70	80						
		BDI Yogyakarta		-	50	60	70	80						
		BDI Surabaya		-	50	60	70	80						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan						Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		BDI Makassar		-	50	60	70	80						
		BDI Denpasar		-	50	60	70	80						
		SMAK Bogor		-	50	60	70	80						
		SMAK Padang		-	50	60	70	80						
		SMAK Makassar		-	50	60	70	80						
		SMTI Banda Aceh		-	50	60	70	80						
		SMTI Makassar		-	50	60	70	80						
		SMTI Yogyakarta		-	50	60	70	80						
		SMTI Bandar Lampung		-	50	60	70	80						
		SMTI Padang		-	50	60	70	80						
		SMTI Pontianak		-	50	60	70	80						
		Politeknik STMI Jakarta		-	50	60	70	80						
		Politeknik STTT Bandung		-	50	60	70	80						
		Politeknik AKA Bogor		-	50	60	70	80						
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		-	50	60	70	80						
		Politeknik ATI Padang		-	50	60	70	80						
		Politeknik ATK Yogyakarta		-	50	60	70	80						
		Politeknik APP Jakarta		-	50	60	70	80						
		Politeknik ATI Makassar		-	50	60	70	80						
		Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		-	50	60	70	80						
		Industri Logam Morowali		-	50	60	70	80						
		Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		-	50	60	70	80						
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		-	50	60	70	80						
SK 5	Terwujudnya Birokrasi BPSDMI yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
	1	Nilai laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	76	78						Set. BPSDMI
		BDI Medan		70	72	74	76	78						
		BDI Padang		70	72	74	76	78						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK	Satuan						Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	BDI Jakarta		70	72	74	76	78						
	BDI Yogyakarta		73	73,5	74	74,5	75						
	BDI Surabaya		70	72	74	75	76						
	BDI Makassar		69	70	72	73	75						
	BDI Denpasar		68	70	72	74	76						
	SMAK Bogor		70	72	74	76	78						
	SMAK Padang		70	72	74	76	78						
	SMAK Makassar		72	75	80	85	90						
	SMTI Banda Aceh		65	68	70	72	74						
	SMTI Makassar		70	72	74	76	78						
	SMTI Yogyakarta		70	72	74	76	78						
	SMTI Bandar Lampung		70	72	73	74	75						
	SMTI Padang		70	72	74	76	77						
	SMTI Pontianak		70	72	74	76	78						
	Politeknik STMI Jakarta		70	72	74	76	78						
	Politeknik STTT Bandung		70	70	72	74	76						
	Politeknik AKA Bogor		70	72	72	76	78						
	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		70	70	70	72	74						
	Politeknik ATI Padang		70	71	72	73	74						
	Politeknik ATK Yogyakarta		80	80,5	81	81,5	82						
	Politeknik APP Jakarta		70	72	74	76	78						
	Politeknik ATI Makassar		70	72	74	76	78						
	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		70	72	74	76	78						
	Industri Logam Morowali		70	72	75	78	80						
	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		70	72	74	76	78						
	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		70	72	74	76	78						
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	76	78						Set. BPSDMI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK	Satuan						Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	BDI Medan		70	72	74	76	78						
	BDI Padang		78	80	82	83	84						
	BDI Jakarta		65	67	69	71	72						
	BDI Yogyakarta		70	72	73	74	75						
	BDI Surabaya		75	76	77	78	79						
	BDI Makassar		69	70	72	73	75						
	BDI Denpasar		78	78	79	79	80						
	SMAK Bogor		75	78	81	84	87						
	SMAK Padang		76	77	78	79	80						
	SMAK Makassar		70	71	73	78	80						
	SMTI Banda Aceh		70	70	71	73	75						
	SMTI Makassar		62,5	65	68	70	72,5						
	SMTI Yogyakarta		71	73	74	78	80						
	SMTI Bandar Lampung		70	72	73	74	75						
	SMTI Padang		70	71	75	77	78						
	SMTI Pontianak		70	72	74	76	78						
	Politeknik STMI Jakarta		60	64	67	72	78						
	Politeknik STTT Bandung		65	70	72	75	80						
	Politeknik AKA Bogor		70	72	74	76	78						
	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		70	70	70	72	74						
	Politeknik ATI Padang		70	71	72	73	74						
	Politeknik ATK Yogyakarta		65	70	71	72	73						
	Politeknik APP Jakarta		70	72	74	76	78						
	Politeknik ATI Makassar		65	70	72	75	78						
	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		64	66	72	74	76						
	Industri Logam Morowali		58	60	66	72	78						
	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		65	66	70	75	80						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan						Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		52.5	61	64	72	75						
SK 5	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian													
	1	Rata-rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BPSPDI	Indeks	70	71	73	76	80						
		Sekretariat BPSPDI		70	71	73	76	80	all					
		Pusat SDM Aparatur		70	71	73	76	80						
		Pusat SDM Industri		70	71	73	76	80						
		PPPVI		70	71	73	76	80						
		BDI Medan		70	71	73	76	80						
		BDI Padang		70	71	73	76	80						
		BDI Jakarta		70	71	73	76	80						
		BDI Yogyakarta		70	71	73	76	80						
		BDI Surabaya		70	71	73	76	80						
		BDI Makassar		70	71	73	76	80						
		BDI Denpasar		70	71	73	76	80						
		SMAK Bogor		70	71	73	76	80						
		SMAK Padang		70	71	73	76	80						
		SMAK Makassar		70	71	73	76	80						
		SMTI Banda Aceh		70	71	73	76	80						
		SMTI Makassar		70	71	73	76	80						
		SMTI Yogyakarta		70	71	73	76	80						
		SMTI Bandar Lampung		70	71	73	76	80						
		SMTI Padang		70	71	73	76	80						
		SMTI Pontianak		70	71	73	76	80						
		Politeknik STMI Jakarta		70	71	73	76	80						
		Politeknik STTT Bandung		70	71	73	76	80						
		Politeknik AKA Bogor		70	71	73	76	80						
		Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		70	71	73	76	80						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan						Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Politeknik ATI Padang		70	71	73	76	80						
		Politeknik ATK Yogyakarta		70	71	73	76	80						
		Politeknik APP Jakarta		70	71	73	76	80						
		Politeknik ATI Makassar		70	71	73	76	80						
		Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		70	71	73	76	80						
		Industri Logam Morowali		70	71	73	76	80						
		Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		70	71	73	76	80						
		Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		70	71	73	76	80						
SK 6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91	91,5	92	92,5	93						
		Sekretariat BPSDMI		91	91,5	92	92,5	93						
		Pusat SDM Aparatur		91	91,5	92	92,5	93						
		Pusat SDM Industri		91	91,5	92	92,5	93						
		PPPVI		91	91,5	92	92,5	93						
		BDI Medan		91	91,5	92	92,5	93						
		BDI Padang		91	91,5	92	92,5	93						
		BDI Jakarta		91	91,5	92	92,5	93						
		BDI Yogyakarta		91	91,5	92	92,5	93						
		BDI Surabaya		91	91,5	92	92,5	93						
		BDI Makassar		91	91,5	92	92,5	93						
		BDI Denpasar		91	91,5	92	92,5	93						
		SMAK Bogor		91	91,5	92	92,5	93						
		SMAK Padang		91	91,5	92	92,5	93						
		SMAK Makassar		91	91,5	92	92,5	93						
		SMTI Banda Aceh		91	91,5	92	92,5	93						
		SMTI Makassar		91	91,5	92	92,5	93						
		SMTI Yogyakarta		91	91,5	92	92,5	93						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK	Satuan						Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SMTI Bandar Lampung		91	91,5	92	92,5	93						
	SMTI Padang		91	91,5	92	92,5	93						
	SMTI Pontianak		91	91,5	92	92,5	93						
	Politeknik STMI Jakarta		91	91,5	92	92,5	93						
	Politeknik STTT Bandung		91	91,5	92	92,5	93						
	Politeknik AKA Bogor		91	91,5	92	92,5	93						
	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		91	91,5	92	92,5	93						
	Politeknik ATI Padang		91	91,5	92	92,5	93						
	Politeknik ATK Yogyakarta		91	91,5	92	92,5	93						
	Politeknik APP Jakarta		91	91,5	92	92,5	93						
	Politeknik ATI Makassar		91	91,5	92	92,5	93						
	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		91	91,5	92	92,5	93						
	Industri Logam Morowali		91	91,5	92	92,5	93						
	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		91	91,5	92	92,5	93						
	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		91	91,5	92	92,5	93						
2	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Level	3	3	3	4	4						
	Sekretariat BPSDMI		3	3	3	4	4						
	BDI Medan		3	3	3	4	4						
	BDI Padang		3	3	3	4	4						
	BDI Jakarta		3	3	3	4	4						
	BDI Yogyakarta		3	3	3	4	4						
	BDI Surabaya		3	3	3	4	4						
	BDI Makassar		3	3	3	4	4						
	BDI Denpasar		3	3	3	4	4						
	SMAK Bogor		3	3	3	4	4						
	SMAK Padang		3	3	3	4	4						
	SMAK Makassar		3	3	3	4	4						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK	Satuan						Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SMTI Banda Aceh		3	3	3	4	4						
	SMTI Makassar		3	3	3	4	4						
	SMTI Yogyakarta		3	3	3	4	4						
	SMTI Bandar Lampung		3	3	3	4	4						
	SMTI Padang		3	3	3	4	4						
	SMTI Pontianak		3	3	3	4	4						
	Politeknik STMI Jakarta		3	3	3	4	4						
	Politeknik STTT Bandung		3	3	3	4	4						
	Politeknik AKA Bogor		3	3	3	4	4						
	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan		3	3	3	4	4						
	Politeknik ATI Padang		3	3	3	4	4						
	Politeknik ATK Yogyakarta		3	3	3	4	4						
	Politeknik APP Jakarta		3	3	3	4	4						
	Politeknik ATI Makassar		3	3	3	4	4						
	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta		3	3	3	4	4						
	Industri Logam Morowali		3	3	3	4	4						
	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu		3	3	3	4	4						
	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng		3	3	3	4	4						

Lampiran 3 Matriks Keterkaitan antara Aktivitas/Kegiatan, KRO, RO, Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI)									
Sasaran Strategis	SS1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas							
Indikator Kinerja SS	SS1.1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	BPSDMI	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP1.1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Sekretariat BPSDMI	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94
Sasaran Kegiatan	SK1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Sekretariat BPSDMI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Sekretariat BPSDMI	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94
Indikator Kinerja SS	SS1.2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Sekretariat BPSDMI	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP1.2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Set BPSDMI	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan	SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Set BPSDMI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.2	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Set BPSDMI	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65
Indikator Kinerja SS	SS1.3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Set BPSDMI	Rp Juta /orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP1.3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Set BPSDMI	Rp Juta /orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73
Sasaran Kegiatan	SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Set BPSDMI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.3	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Set BPSDMI	Rp Juta /orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73
Indikator Kinerja SS	SS1.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	PPPVI	Persen	50	77	79	81	83
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BPSDMI						

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Program	SP1.5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	PPPVI	Persen	50	77	79	81	83
Sasaran Kegiatan	SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.1	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	PPPVI	Persen	50	77	79	81	83
Indikator Kinerja SS	SS1.8	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Pusdiklat Industri	Orang	17.000	43.000	27.600	95.000	100.000
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP1.4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Pusdiklat Industri	Orang	17.000	43.000	27.600	95.000	100.000
Sasaran Kegiatan	SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Pusdiklat Industri						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.1	Tenaga kerja industri yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Pusdiklat Industri	Orang	3580	4.900	20.000	20.000	20.000
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.2	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Pusdiklat Industri	Orang	810	480	5.000	18.000	19.000

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan	SK1	Meningkatnya daya saing Tenaga Kerja Industri	BDI, SMK, Poltek dan Akom						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.1	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	BDI	Orang	16.190	42.520	22.600	77.000	81.000
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	SMK dan Poltek	Persen	50	77	79	81	83
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.3	Tenaga kerja industri yang kompeten	SMK dan Poltek	Orang	23.820	23.920	24.070	24.320	23.920
Sasaran Strategis	SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0							
Indikator Kinerja SS	SS2.5	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Pusdiklat SDM Industri	Orang	400	400	400	400	400
Sasaran Program	SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP2.1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	PPPVI	Implementasi	21	21	21	21	21
Sasaran Kegiatan	SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	PPPVI	Implementasi	1	3	5	7	9

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan	SK3	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	BDI, SMK, Poltek dan Akom						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	SMK dan Poltek						
Indikator Kinerja Program	SP2.2	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Pusdiklat Industri	Orang	400	400	400	400	400
Sasaran Kegiatan	SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Pusdiklat Industri						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.1	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Pusdiklat Industri	Orang	400	400	400	400	400
Indikator Kinerja Program	SP2.3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	Pusdiklat industri dan PPPVI	Persen	30	50	70	90	95
Sasaran Kegiatan	SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Pusdiklat Industri						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.2	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	Pusdiklat Industri	Persen	NA	NA	70	90	95
Sasaran Strategis	SS3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa, serta industri halal dalam negeri							
Indikator Kinerja SS	SS3.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam	Semua Unit Eselon I	Persen	-	75	80	85	90

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
		pengadaan barang dan jasa Kemenperin							
Sasaran Program	SP5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP5.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Semua Unit Eselon II dan satker daerah di BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80
Sasaran Kegiatan	SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Set BPSDMI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	Set BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80
Sasaran Kegiatan	SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Pusdiklat Industri						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	Pusdiklat Industri	Persen	-	50	60	70	80
Sasaran Kegiatan	SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	PPPVI	Persen	-	50	60	70	80

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan	SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Pusbindiklat SDM Aparatur						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	Pusbindiklat SDM Aparatur	Persen	-	50	60	70	80
Sasaran Kegiatan	SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	BDI, SMK, Poltek dan Akom						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	BDI, SMK dan Poltek	Persen	-	50	60	70	80
Sasaran Strategis	SS7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif							
Indikator Kinerja SS	SS7.1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	Semua Unit Eselon I	Persen	72	74	76	78	80
Sasaran Program	SP9	Tersedianya Regulasi terkait SDM Industri yang Efektif	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP9.1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan BPSDMI	Set BPSDMI	Persen	-	72	74	78	78
Sasaran Kegiatan	SK5	Tersedianya Regulasi terkait SDM Industri yang Efektif	Set BPSDMI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK5.1	Efektivitas Regulasi terkait SDM Industri	Set BPSDMI	Persen	-	72	74	78	78

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis	SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan							
Indikator Kinerja SS	SS8.2	Infrastruktur kompetensi industri	Pusdiklat SDM Industri	SKKNI	8	10	10	10	10
Sasaran Program	SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP4.1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	Pusdiklat Industri	SKKNI	8	8	10	10	10
Sasaran Kegiatan	SK3	Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Kompetensi Industri	Pusdiklat Industri						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	Pusdiklat Industri	SKKNI	8	8	10	10	10
Sasaran Kegiatan	SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	BDI, SMK, Poltek dan Akom						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.4	Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional	BDI	Sertifikasi	0	2	3	5	7
Indikator Kinerja Program	SP4.2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri	Pusdiklat Industri	LSP dan TUK	5	6	20	20	20
Sasaran Kegiatan	SK3	Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Kompetensi Industri	Pusdiklat Industri						

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri	Pusdiklat Industri	LSP dan TUK	5	6	20	20	20
Indikator Kinerja Program	SP4.3	Asesor kompetensi dan lisensi	Pusdiklat Industri	Asesor	144	154	300	310	320
Sasaran Kegiatan	SK3	Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Kompetensi Industri	Pusdiklat Industri						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.3	Asesor kompetensi dan lisensi	Pusdiklat Industri	Asesor	144	154	300	310	320
Indikator Kinerja Program	SP4.4	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	PPPVI	Perusahaan	4	6	8	10	12
Sasaran Kegiatan	SK3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	PPPVI	Perusahaan/ Industri	4	6	8	10	12
Sasaran Kegiatan	SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	BDI, SMK, Poltek dan Akom						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	SMK dan Poltek	Perusahaan/ Industri	4	6	11	13	15

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Program	SP4.5	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	PPPVI	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)
Sasaran Kegiatan	SK3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.3	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	PPPVI	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)
Sasaran Kegiatan	SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	BDI, SMK, Poltek dan Akom						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.3	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Poltek	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)
Indikator Kinerja Program	SP4.6	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	PPPVI	Penelitian	100	120	150	170	200
Sasaran Kegiatan	SK3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.2	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	PPPVI	Penelitian	100	120	150	170	200
Sasaran Kegiatan	SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	BDI, SMK, Poltek dan Akom						

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.2	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Poltek	Penelitian	100	120	150	170	200
Indikator Kinerja Program	SP4.7	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	Pusdiklat Industri	Tenant	41	34	50	60	70
Sasaran Kegiatan	SK3	Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Kompetensi Industri	Pusdiklat Industri						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.4	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	Pusdiklat Industri	Tenant	41	34	50	60	70
Sasaran Kegiatan	SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	BDI, SMK, Poltek dan Akom						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.5	Inkubator industri yang tumbuh	BDI dan Poltek	Tenant	41	34	50	60	70
Sasaran Strategis	SS9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
Indikator Kinerja SS	SS9.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Semua Unit Eselon I	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Sasaran Program	SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP8.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Set BPSDMI	Persen	91	91,5	92	92,5	93

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan	SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Set BPSDMI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Set BPSDMI	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Sasaran Kegiatan	SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Pusdiklat Industri						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Pusdiklat Industri	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Sasaran Kegiatan	SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	PPPVI	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Sasaran Kegiatan	SK5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Pusbindiklat SDM Aparatur						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Pusbindiklat SDM Aparatur	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Indikator Kinerja SS	SS9.3	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Semua Unit Eselon I	Level	3	3	3	4	4

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program	SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP8.2	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Set BPSDMI	Level	3	3	3	4	4
Sasaran Kegiatan	SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Set BPSDMI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Set BPSDMI	Level	3	3	3	4	4
Sasaran Strategis	SS10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian							
Indikator Kinerja SS	SS10.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	Set BPSDMI	Indeks	70	71	73	76	80
Sasaran Program	SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP7.1	Rata-rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BPSDMI	Pusbindiklat SDM Aparatur	Indeks	70	71	73	76	80
Sasaran Kegiatan	SK2	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Set BPSDMI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai BPSDMI	Set BPSDMI	Indeks	70	71	73	76	80

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program	SK5	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Pusdiklat Industri						
Indikator Kinerja Program	SK5.1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Pusdiklat Industri	Indeks	70	71	73	76	80
Sasaran Kegiatan	SK5	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK5.1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	PPPVI	Indeks	70	71	73	76	80
Sasaran Kegiatan	SK6	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Pusbindiklat SDM Aparatur						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.3	Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Pusbindiklat SDM Aparatur	Pusbindiklat SDM Aparatur	Nilai	-	71	73	76	80
Indikator Kinerja SS	SS10.2	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Pusbindiklat SDM Aparatur	Persen	80	82	85	87	90
Sasaran Program	SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP3.1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Pusbindiklat SDM Aparatur	Persen	80	82	85	87	90

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan	SK1	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Kompeten dan Profesional	Pusbindiklat SDM Aparatur						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	Pusbindiklat SDM Aparatur	Persen	-	80	82	85	87
Sasaran Kegiatan	SK2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Bidang Industri Melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pusbindiklat SDM Aparatur						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.1	Persentase SDM yang kompeten melalui pelatihan	Pusbindiklat SDM Aparatur	Persen		90	92	93	95
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.2	Akreditasi kelembagaan pelatihan manajerial	Pusbindiklat SDM Aparatur	Predikat	-	B	B	B	BB
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.3	Ketepatan waktu kelulusan peserta program pendidikan Formal	Pusbindiklat SDM Aparatur	Persen	-	80	82	85	87
Indikator Kinerja Program	SP3.2	Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional	Pusbindiklat SDM Aparatur	Persen	0	70	75	80	85
Sasaran Kegiatan	SK1	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Kompeten dan Profesional	Pusbindiklat SDM Aparatur						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.2	Efektivitas pelaksanaan pembinaan JF	Pusbindiklat SDM Aparatur	Persen	-	70	75	80	85

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan	SK3	Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional	Pusbindiklat SDM Aparatur						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.1	Peningkatan penetapan angka kredit	Pusbindiklat SDM Aparatur	Persen	-	75	77	80	83
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.2	Efektivitas Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional	Pusbindiklat SDM Aparatur	Persen	-	75	80	82	85
Sasaran Strategis	SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
Indikator Kinerja SS	SS12.1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Setjen	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran Program	SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP6.1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Set BPSDMI	Nilai	70	72	74	76	78
Sasaran Kegiatan	SK3	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Set BPSDMI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Set BPSDMI	Nilai	70	72	74	76	78

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Program	SP6.3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Set BPSDMI	Nilai	0	75	77	79	80
Sasaran Kegiatan	SK3	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Set BPSDMI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Set BPSDMI	Nilai	0	75	77	79	80
Sasaran Kegiatan	SK6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Pusbindiklat SDM Aparatur						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.2	Nilai Kearsipan	Pusbindiklat SDM Aparatur	Nilai	-	68	70	72	75
Sasaran Strategis	SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel							
Indikator Kinerja SS	SS13.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Seluruh Eselon II	Nilai	78	78,2	78,4	78,6	78,8
Sasaran Program	SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	BPSDMI						
Indikator Kinerja Program	SP6.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Set BPSDMI	Nilai	70	72	74	76	78

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan	SK3	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Set BPSDMI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Set BPSDMI	Nilai	70	72	74	76	78
Sasaran Kegiatan	SK7	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Pusdiklat Industri						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK7.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Pusdiklat Industri	Nilai	70	72	74	76	78
Sasaran Kegiatan	SK7	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK7.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	PPPVI	Nilai	70	72	74	76	78
Sasaran Kegiatan	SK6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Pusbindiklat SDM Aparatur						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Pusbindiklat SDM Aparatur	Nilai	-	72	75	77	80

Lampiran 4 Pedoman Kinerja

1. Tersedianya SDM industri yang kompeten

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
TJ	Meningkatnya peran SDM industri dalam perekonomian nasional						
IK	Tersedianya SDM industri yang kompeten	-	-	-	-	-	-
DEFINISI/DESKRIPSI							
Menurut UU No. 3/2014 Perindustrian, sumber daya industri meliputi: a) tenaga kerja industri; b) pembina industri; c) wirausaha industri; dan d) konsultan industri. SDM industri dinyatakan kompeten apabila telah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dan/atau pemagangan untuk seluruh jenis SDM industri, serta inkubator industri khusus untuk wirausaha industri.							
SUMBER DATA							
d) Tenaga kerja industri diantaranya terdiri dari lulusan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, Lulusan SMK dan Politeknik/Akademi komunitas Kementerian Perindustrian pada tahun berjalan, diklat SDM 4.0, dan Tenaga Kerja Industri yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi e) Pembina industri merupakan ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi, misal diklat teknis industri, diklat fungsional, diklat penjenjangan, rintisan gelas, diklat instruktur f) Wirausaha industri merupakan jumlah orang yang mengikuti indkubator bisnis yang di fasilitasi oleh Balai Diklat Industri g) Konsultan industri, tidak menjadi tanggungjawab BPSDMI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Lulusan pelatihan vokasi berbasis kompetensi + SMK dan Politeknik/Akademi komunitas Kementerian Perindustrian pada tahun berjalan + Peserta pelatihan SDM Industri 4.0 + Tenaga Kerja Industri yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi + Peserta Diklat Teknis + Peserta Diklat Fungsional ++Peserta Diklat Penjenjangan + Rintisan Gelar + Diklat Instruktur + Jumlah indkubator bisnis yang di fasilitasi oleh Balai Diklat Industri							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
orang	Maksimasi	BPSDMI					

2. Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas						
IK.1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	18,9	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sehubungan dengan sektor industri merupakan kontributor terbesar dalam PDB, sektor industri diharapkan menjadi <i>leading sector</i> yang mampu mengungkit sektor lainnya serta membuka lapangan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri dihitung menggunakan data Sakernas.							
SUMBER DATA							
Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dipublikasikan oleh BPS.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan nonmigas dari Sakernas, yaitu KBLI 10-18 dan 20-33.							

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Juta orang	Maksimasi	Set. BPSPDMI

Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas						
IK.2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja	14,9	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65
DEFINISI/DESKRIPSI							
Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan kemandirian dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional. Dengan semakin tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor industri nonmigas merupakan salah satu indikasi bahwa industri nasional semakin mandiri, maju, dan berdaya saing. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja dihitung menggunakan data Sakernas.							
SUMBER DATA							
Data Sakernas yang dipublikasikan oleh BPS.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas dari Sakernas (yaitu KBLI 10-18 dan 20-33) dibagi total tenaga kerja dikali 100%.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Set. BPSDMI					

3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas						
IK.3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	109,1	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73
DEFINISI/DESKRIPSI							
Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor industri, maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang/jasa. Untuk itu, penyediaan SDM industri yang terampil menjadi salah satu yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional. Nilai produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas merupakan pembagian antara nilai tambah sektor industri nonmigas dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas.							
SUMBER DATA							
Data PDB dan Sakernas yang dipublikasikan oleh BPS dan diolah oleh Pusdatin.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas didapatkan dengan pembagian antara PDB industri nonmigas harga konstan dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas dari Sakernas.							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas						
	Rp Juta/ Orang/Tahun	Maksimasi	Set. BPSDMI				

4. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas						
IK.4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	35.000	17.000	43.000	27.600	95.000	100.000
DEFINISI/DESKRIPSI							
Program pelatihan yang meliputi <i>skilling</i>, <i>upskilling</i>, dan <i>re-skilling</i> dengan skema <i>3-in-1</i> (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM industri. Program ini merupakan program penyiapan tenaga kerja industri melalui pelatihan berbasis kompetensi dan mengikuti sertifikasi kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi, serta lulusannya langsung ditempatkan bekerja pada perusahaan industri. Penyediaan SDM yang kompeten dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan pada Balai Diklat Industri (BDI) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) SDM Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan <i>3-in-1</i> (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) yang terserap di dunia industri. Pelatihan sistem <i>3-in-1</i> (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) diselenggarakan di 7 (tujuh) BDI dan Pusdiklat SDM Industri.							
SUMBER DATA							
Berita acara penempatan lulusan peserta diklat <i>3-in-1</i>							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah peserta diklat <i>3-in-1</i> pada BDI dan Pusdiklat SDM Industri yang mengikuti uji kompetensi dan terserap di dunia kerja pada tahun berjalan							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Orang	Maksimasi	Pusdiklat SDM Industri, BDI					

5. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas						
IK.5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan	63	50	77	79	81	83
DEFINISI/DESKRIPSI							
Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tetapi juga pasar bebas tenaga kerja. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi serta pemagangan. Pendidikan vokasi yang diadakan oleh BPSDMI meliputi pendidikan tinggi (politeknik dan akademi komunitas), program pendidikan setara D1, dan pendidikan menengah (SMK). <i>Output</i> program ini berupa jumlah lulusan. Lulusan yang terserap meliputi yang bekerja di industri, berwirausaha, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Persentase lulusan yang terserap ditargetkan untuk meningkat setiap tahunnya dengan strategi peningkatan kualitas pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Persentase lulusan yang terserap dihitung paling lama satu tahun setelah dinyatakan lulus pada tahun sebelumnya (tahun-1).							
SUMBER DATA							
Data persentase lulusan tahun sebelumnya dari masing-masing satuan kerja pendidikan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah lulusan yang terserap dibagi jumlah seluruh lulusan pada tahun sebelumnya dikali 100%.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	PPPVI, SMK, politeknik					

6. SDM industri 4.0 yang meningkat kompetensinya

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP2	Penguatan implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>						
IK.1	SDM industri 4.0 yang kompeten	205	400	400	400	400	400
DEFINISI/DESKRIPSI							
SDM industri 4.0 yang kompeten merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi dalam bidang industri 4.0. Program pendidikan dan pelatihan (diklat) terdiri atas: <i>industry 4.0 awareness</i> , <i>infografis</i> , dan <i>transformasi industri 4.0</i> .							
SUMBER DATA							
SDM industri 4.0 yang kompeten dari BPSDMI.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah lulusan diklat 4.0 yang kompeten.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Orang	Maksimasi	Pusdiklat SDM Industri					

7. Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP2	Penguatan implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>						
IK.2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	0	1	3	5	7	9
DEFINISI/DESKRIPSI							
Implementasi industri 4.0 memberikan peluang 20 juta lapangan pekerjaan baru dan tantangan <i>re-skilling</i> dan <i>upskilling</i> tenaga kerja untuk 6 hingga 29 juta pekerjaan pada tahun 2030. Mengantisipasi hal ini, pengembangan pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui pengembangan dan implementasi kurikulum industri 4.0 dalam penyelenggaraan pendidikan. Jenis-jenis implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan satelit Pusat Industri Digital (PID) 4.0 2. Implementasi kurikulum industri 4.0 3. Pengaplikasian teknologi industri 4.0 pada pendidikan 4. Pelatihan industri 4.0 pada SDM industri.							
SUMBER DATA							
Data implementasi industri 4.0 pada satuan kerja							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah implementasi							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Implementasi	Maksimasi	PPPVI, SMK, dan politeknik/akademi komunitas					

8. Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP2	Penguatan implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>						
IK.3	Utilisasi Pusat Industri Digital 4.0	-	30	50	70	90	95
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pusat Industri Digital (PID) 4.0 memiliki visi untuk menjadi <i>one-stop solution</i> implementasi industri 4.0 dan jendela Indonesia 4.0 untuk dunia. Untuk mencapai visi tersebut, PID 4.0 memiliki lima layanan utama, yaitu: 1. <i>Showcase Center</i>, tempat untuk menyaksikan langsung implementasi industri 4.0 melalui model <i>factory and miniplant</i> guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang industri 4.0. 2. <i>Capability Center</i>, pusat peningkatan kompetensi SDM industri 4.0 dari CxO, manajer, <i>engineer</i>, <i>frontliner</i>, bahkan ASN Pembina Industri. 3. <i>Ecosystem for Industry 4.0</i>, wadah <i>stakeholder</i> untuk saling berbagi dan bekerja sama dalam proses transformasi ke industri 4.0. 4. <i>Delivery Center</i>, pusat pendampingan dan konsultasi bagi industri untuk transformasi ke industri 4.0. 5. <i>Engineering & AI Center</i>, pusat riset dan <i>testbed</i> untuk mencari solusi dari <i>pain point</i> industri 4.0.							
SUMBER DATA							
Data hasil kegiatan lima layanan utama PID 4.0 Data penyediaan peralatan, utilitas, furnitur dan perlengkapan untuk kegiatan di gedung PID 4.0 dan Data hasil kegiatan 5 layanan utama PID 4.0							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							

Jumlah layanan utama PIDI 4.0 yang diutilisasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fungsi layanan tersebut, serta tingkat utilisasi per layanan utama berdasarkan target/rencana kegiatan tahunan. Realisasi anggaran kelengkapan peralatan, utilitas, furnitur dan gedung PIDI 4.0 yang dapat mendukung layanan utama PIDI 4.0 terpenuhi berdasarkan dokumen rencana kerja PIDI 4.0 dan Realisasi anggaran kegiatan dari layanan utama PIDI 4.0 yang sesuai dengan fungsi layanan tersebut berdasarkan target/rencana kegiatan tahunan.

Utilisasi PIDI 4.0 = (0,5 x Persentase Realisasi Gedung) + (0,25 x (Persentase Realisasi Peralatan)) + (0,25 x (Persentase Realisasi Kegiatan))

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Pusdiklat SDM Industri dan PPPVI

9. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian						
IK.1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	-	80	82	85	87	90
DEFINISI/DESKRIPSI							
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Untuk memenuhi amanat tersebut, pembangunan SDM ASN diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, dan profesional. ASN Kementerian Perindustrian yang mengikuti Program Rintisan Gelar/diklat fungsional/diklat teknis.							
SUMBER DATA							
Data ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDMI.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah nilai/predikat ASN yang lulus diklat fungsional, struktural, dan teknis, serta nilai lulusan Program Rintisan Gelar yang mendapatkan predikat minimal baik melalui rumus: $C = \frac{A + B}{2}$ A = Perbandingan IPK penerima beasiswa di atas 2,75 dengan IPK di bawah 2,75. B = Perbandingan nilai yang diperoleh peserta sebelum melaksanakan pelatihan (<i>pre-test</i>) dengan nilai yang diperoleh peserta sesudah melaksanakan pelatihan (<i>post-test</i>). C = Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Pusbindiklat SDM Aparatur					

10. Efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP3	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian						
IK.2	Efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional	-	0	70	75	80	85
DEFINISI/DESKRIPSI							

Pembinaan terhadap jabatan fungsional pada hakikatnya tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi Pembina. Namun dalam hal pembinaan karir dan pengembangan kompetensinya menjadi tanggungjawab masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah. PPK memiliki peran yang penting dalam hal perhitungan formasi kebutuhan akan Jabatan Fungsional, Pengadaan Jabatan Fungsional, Penilaian Kinerja Jafung, fasilitasi administrasi kepegawaian Jafung, perumusan rekomendasi pengembangan kompetensi sebagai narahubung antara jafung di instansinya dengan instansi pembina. BPSDMI menjadi instansi pembina untuk 3 Jabatan Fungsional Bidang Industri yaitu JF Penyuluh Perindustrian (PFPP), JF Analis Manajemen Mutu Industri (AMMI), dan JF Pembina Industri (PI).		
SUMBER DATA		
Kuesioner Pusbindiklat SDM Aparatur.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Nilai Kuesioner yang disebar keseluruh Pejabat Fungsional Pengguna Layanan Pusbindiklat SDM Aparatur yang mengukur terkait kepuasan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Pusbindiklat SDM Aparatur

11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang industri

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP4	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan						
IK.1	Infrastruktur kompetensi industri/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang industri	20	8	8	10	10	10
DEFINISI/DESKRIPSI							
SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKKNI dibangun sesuai dengan kondisi di tempat kerja sehingga dapat menjadi acuan dalam penyiapan SDM industri melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan serta dalam sertifikasi kompetensi. Keberadaan SKKNI juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kebutuhan rekrutmen tenaga kerjanya serta pengembangan karier pegawai. Penyusunan SKKNI dilakukan oleh praktisi industri, asosiasi industri, asosiasi profesi, dan pakar di bidang industri. Dalam proses perumusan tersebut dapat dibantu oleh akademisi dan perwakilan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Tahapan perumusan SKKNI mencakup: perumusan SKKNI, verifikasi internal, prakonvensi SKKNI, verifikasi eksternal, dan konvensi SKKNI. Setelah standar kompetensi tersusun, perlu dilakukan pemaketan dan penjenjangan kompetensi-kompetensi yang ada pada suatu sektor atau bidang keahlian tertentu yang mengacu pada standar kualifikasi nasional yang ada. Di Indonesia terdapat sembilan jenjang kualifikasi yang dapat diintegrasikan dari sisi pendidikan dan pelatihan, serta dari sisi pengalaman kerja. Penjenjangan kualifikasi nasional tersebut dikenal dengan KKNi. Seperti halnya SKKNI, penyusunan KKNi juga dilakukan oleh praktisi industri, asosiasi industri, asosiasi profesi, pakar di bidang industri, akademisi, dan perwakilan LSP. Tahapan penyusunan KKNi lebih singkat dibanding SKKNI yaitu perumusan, verifikasi, dan konvensi KKNi.							
SUMBER DATA							
Data SKKNI/KKNi yang disusun pada tahun berjalan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah SKKNI/KKNi yang disusun pada tahun berjalan hingga proses usulan penetapan.							

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Dokumen SKKNI	Maksimasi	Pusdiklat SDM Industri

Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP4	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan						
IK.2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri	20	5	6	20	20	20
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSP yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi (Perpres No. 10/2018). LSP merupakan perpanjangan tangan BNSP untuk melakukan sertifikasi kompetensi sesuai ruang lingkupnya masing-masing. Secara umum, terdapat tiga jenis LSP, yaitu: LSP Pihak Pertama (terdiri dari LSP P1 Industri dan LSP P1 Pendidikan dan Pelatihan), LSP Pihak Kedua, dan LSP Pihak Ketiga. Pendirian LSP memerlukan beberapa persyaratan, antara lain: skema sertifikasi, asesor kompetensi, materi uji kompetensi, dan dokumen pendukung lainnya. Tempat yang digunakan sebagai lokasi uji kompetensi disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK). Secara umum terdapat 3 (tiga) jenis TUK, yaitu: TUK tempat kerja, TUK sewaktu, dan TUK mandiri. Seluruh TUK yang akan digunakan oleh LSP dalam melakukan pengujian dan sertifikasi kompetensi harus diverifikasi dan dipastikan telah merepresentasikan kondisi lingkungan kerja sesungguhnya. Pendirian dan pengembangan LSP dan TUK sektor industri dapat difasilitasi melalui kegiatan pada Pusdiklat SDM Industri BPSPDMI.							
SUMBER DATA							
Data LSP yang difasilitasi pada tahun berjalan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah LSP yang difasilitasi pada tahun berjalan.							
SATUAN		KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA				
LSP dan TUK		Maksimasi	Pusdiklat SDM Industri				

12. Asesor kompetensi dan lisensi

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP4	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan						
IK.3	Asesor kompetensi dan lisensi	312	144	154	300	310	320
DEFINISI/DESKRIPSI							
Asesor kompetensi adalah orang yang melakukan pengujian kompetensi. Seorang asesor kompetensi harus menguasai teknis bidang yang diujikan serta metodologi pengujiannya. Kompetensi metodologi tersebut diberikan melalui diklat asesor kompetensi. Peserta asesor kompetensi dapat berasal dari unsur praktisi industri, asosiasi industri atau profesi, pakar, akademisi, dan pihak lain yang berkaitan dengan lingkup LSP induk. Di akhir sesi diklat, peserta akan mengikuti uji kompetensi sebagai bukti kelayakan untuk direkomendasikan sebagai seorang asesor kompetensi. Masa berlaku sertifikat asesor kompetensi adalah tiga tahun. Seorang asesor kompetensi tidak dapat ditugaskan melakukan pengujian bila masa berlaku sertifikat kompetensinya sudah habis. Untuk itu, asesor kompetensi dapat memperpanjang masa berlaku sertifikat melalui mekanisme diklat <i>Recognition Current Competency</i> (RCC). Asesor kompetensi yang bisa menjadi peserta diklat RCC adalah asesor kompetensi yang sudah pernah melakukan pengujian kompetensi dan dibuktikan melalui portofolio uji kompetensi.							
SUMBER DATA							
Data jumlah peserta pelatihan asesor kompetensi dan RCC Asesor Kompetensi.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah peserta diklat asesor kompetensi dan RCC Asesor Kompetensi yang direkomendasikan sebagai asesor kompetensi							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Orang	Maksimasi	Pusdiklat SDM Industri					

13. Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP4	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan						
IK.4	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	0	4	6	8	10	12
DEFINISI/DESKRIPSI							
Dalam upaya pengembangan kompetensi, unit pendidikan diharapkan dapat terlibat dalam pengembangan ekosistem industri dan melakukan kerja sama dengan industri dengan pola saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kerja sama ini penting bagi unit pendidikan untuk: menggali dan memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat; melaksanakan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan dan memanfaatkan hasil penelitian secara konkret; dan mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang memadai. Jenis kerja sama dan pengabdian masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh industri dari unit pendidikan adalah sebagai berikut: 1) pendampingan teknologi; 2) pendidikan dan pelatihan; 3) pelayanan konsultasi industri; 4) penyuluhan; dan pemanfaatan lokakarya/laboratorium/teaching factory.							
SUMBER DATA							
Data perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dari unit kerja pendidikan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dari unit kerja pendidikan di akhir tahun							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			

Perusahaan/Industri	Maksimasi	PPPVI, SMK, dan politeknik/akademi komunitas
---------------------	-----------	--

14. Nilai minimum akreditasi program studi di politeknik

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP4	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan						
IK.5	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	0	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)
DEFINISI/DESKRIPSI							
Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi untuk menentukan kelayakan program akademiknya.							
SUMBER DATA							
Sertifikat akreditasi dan surat keputusan (SK) dari lembaga akreditasi.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai rata-rata prodi dari beberapa nilai akreditasi program studi diatas 300. Bagi program studi yang nilainya di bawah 300, diminta untuk melakukan reakreditasi.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	PPPVI dan politeknik					

15. Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasi melalui seminar nasional dan internasional

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP4	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan						
IK.6	Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasiikan melalui seminar nasional dan internasional	100	100	120	150	170	200
DEFINISI/DESKRIPSI							
UU No. 12/2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib melaksanakan tridarma perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian, perguruan tinggi dituntut untuk memiliki dosen yang kompeten dan mampu menyusun proposal, melaksanakan, dan mendiseminasiikan hasil penelitian, serta menghasilkan berbagai proses dan produk teknologi, seni, dan budaya yang berujung pada Hak Kekayaan Intelektual untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian. Revolusi Industri 4.0 atau <i>Fourth Industry Revolution</i> (4IR) yang digaungkan beberapa tahun terakhir tak hanya fokus pada pengembangan sektor industri. Lebih dari itu, revolusi industri juga memengaruhi berbagai bidang kehidupan, yaitu SDM yang kompeten, peningkatan keterampilan berbasis teknologi, serta persaingan di kancah perdagangan internasional. Peningkatan kualitas SDM bisa diwujudkan melalui penelitian terapan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Target penerapan hasil penelitian oleh politeknik dan akademi komunitas adalah publikasi hasil penelitian melalui tulisan ilmiah prosiding seminar nasional/internasional, serta jurnal ilmiah nasional terakreditasi/bereputasi internasional.							
SUMBER DATA							
Data artikel penelitian yang sudah terpublikasi.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah data artikel penelitian yang sudah terpublikasi.							

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Publikasi Penelitian	Maksimasi	PPPVI dan politeknik/akademi komunitas

16. Inkubator industri yang tumbuh

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP4	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan						
IK.7	Inkubator bisnis industri yang tumbuh	3	41	34	50	60	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Program Inkubator Bisnis merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada peserta inkubasi (<i>tenant</i>). <i>Tenant</i> inkubator bisnis pada Balai Diklat Industri (BDI) dan pendidikan tinggi adalah masyarakat (umum, mahasiswa, dan alumni) yang memiliki prospektif usaha. Adapun tahapan kegiatan inkubator bisnis di BDI dan pendidikan tinggi meliputi: 1. Tahap pra-inkubasi 2. Tahap inkubasi 3. Tahap pasca-inkubasi Peserta inkubasi terdiri dari peserta yang sudah memiliki usaha atau baru mulai dari awal. <i>Output</i> dari inkubator bisnis ini adalah <i>tenant</i> yang memiliki produk yang siap dipasarkan.							
SUMBER DATA							
Sertifikat tanda menyelesaikan kegiatan inkubator bisnis.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah <i>tenant</i> yang memiliki produk yang siap dipasarkan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
<i>Tenant</i>	Maksimasi	Pusdiklat SDM Industri, BDI, dan politeknik/akademi komunitas					

17. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP5	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri						
IK.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	NA	-	50	60	70	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya menindaklanjuti Keppres No. 24/2018 tentang Tim Nasional P3DN. Optimalisasi penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja K/L. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian.							
SUMBER DATA							
Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, dan 533111.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							

Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Kemenperin diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotAP3DN}$

R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Kemenperin

RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.

$TotAP3DN$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Seluruh unit Eselon II dan satuan kerja daerah di BPSDMI

18. Nilai laporan keuangan BPSDMI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP6	Terwujudnya birokrasi BPSDMI yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
IK.1	Nilai laporan keuangan BPSDMI	70	70	72	74	76	78
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan, satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian wajib menyusun laporan keuangan. Penilaian atas laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan agar setiap satuan kerja dapat menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat waktu.							
SUMBER DATA							
Nilai laporan keuangan berasal dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Biro Keuangan Kementerian Perindustrian menilai laporan keuangan dengan lingkup penilaian: 1. Kelengkapan laporan keuangan, meliputi: penjelasan umum, penjelasan laporan operasional, penjelasan laporan perubahan ekuitas, dan pengungkapan penting lainnya. 2. Kelengkapan lampiran, meliputi: lampiran BMN dan lampiran e-Rekon.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	Sekretariat BPSDMI					

19. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) BPSDMI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2018	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP6	Terwujudnya birokrasi BPSDMI yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
IK.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPSDMI	77,12	70	72	74	76	78
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi tersebut, penilaian dilakukan terhadap lima komponen, yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaian indikator ini baru dapat dilihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya.							
SUMBER DATA							
Data nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dari Kementerian PAN-RB.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							

Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PAN-RB No. 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dinilai oleh tim dari Kementerian PAN-RB.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	Sekretariat BPSDMI

20. Nilai kearsipan BPSDMI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2018	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP6	Terwujudnya birokrasi BPSDMI yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
IK.3	Nilai kearsipan BPSDMI	0	0	75	77	79	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Biro Umum Kemenperin menyelenggarakan penilaian kearsipan setiap tahun. Tim penilai berasal dari arsiparis setiap satuan kerja pusat dan daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian.							
SUMBER DATA							
Data nilai kearsipan dari Biro Umum Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai kearsipan satuan pusat dan satuan kerja daerah.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	Sekretariat BPSDMI					

21. Indeks kompetensi, profesionalitas, dan integritas pegawai BPSDMI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Pprofessional dan Berkepribadian						
IK.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	NA	70	71	73	76	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Kementerian Perindustrian adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN secara kuantitatif. Hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi upaya pengembangan profesionalisme ASN.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN No. 8/2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Rentang nilai kategori tingkat profesionalitas ASN adalah sebagai berikut: A. 91—100 (sangat tinggi) B. 81—90 (tinggi) C. 71—80 (sedang) D. 61—70 (rendah) E. ≤ 60 (sangat rendah)							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	Pusbindiklat SDM Aparatur					

22. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IK.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja	90	91	91,5	92	92,5	93
DEFINISI/DESKRIPSI							
Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal berarti unit/satuan kerja tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif atas hasil pengawasan, tetapi juga menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut. Indikator ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi karena dengan menindaklanjuti hasil pengawasan, unit/satuan kerja secara langsung melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.							
SUMBER DATA							
Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, database Inspektorat Jenderal.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Sekretariat BPSDMI					

23. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IK.2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	NA	3	3	3	4	4
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Manajemen Risiko (MRI) merupakan indeks yang melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui lima level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Setiap level memiliki karakteristik yang dijelaskan pada pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.							
SUMBER DATA							
Penilaian mandiri level MRI dan nilai final level MRI dari hasil <i>Quality Assurance</i> oleh BPKP.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Level MRI dinilai dengan memerhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Level	Maksimasi	Sekretariat BPSDMI					

24. Efektivitas regulasi terkait SDM Industri

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP9	Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif						
IK.1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Perindustrian	NA	-	72	74	78	78
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sesuai dengan amanat UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri dilakukan secara terencana dan sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Penyusunan regulasi bidang industri pengolahan nonmigas diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan presiden dalam mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan kepastian usaha. Oleh sebab itu, setiap regulasi yang disusun oleh Kementerian Perindustrian diharapkan efektif dan mencapai tujuan dari regulasi. Efektivitas regulasi yang disusun diukur melalui indikator efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin.							
SUMBER DATA							
Semua unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin didapatkan dari hasil perhitungan <i>monitoring</i> dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing unit Eselon I dengan melihat sampel regulasi, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus: $Er = \frac{SR_e}{T_s}$ Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah sampel regulasi yang tercapai tujuannya Ts = Jumlah total regulasi yang dijadikan sampel perhitungan							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Sekretariat BPSDMI					

Lampiran 5 Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Rpermen Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BNSP	2022
2	Rpermen Pengembangan SMK Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbudristek dan BNSP	2022
3	Rpermen Pengembangan Lembaga Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BNSP	2022
4	Rpermen Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Kemendikbudristek dan BNSP	2022
5	Rpermen Pengelolaan Inkubator Industri Berbasis Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin, Kementerian Ketenagakerjaan, BNSP	2022
6	Rpermen Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi dengan Sistem <i>3-in-1</i>	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin	2022
7	Rpermen Pengembangan ASN Industri Berbasis Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN-RB	2022